

**KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN (ANALISIS
PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD DAN MUSDAH MULIA)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Oleh :

**MIFTAKHUL HUDA
NPM. 1721010129**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam



Pembimbing I : Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H / 2021M**

**KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN (ANALISIS
PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD DAN MUSDAH MULIA)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Oleh :

**MIFTAKHUL HUDA
NPM. 1721010129**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam



Pembimbing I : Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H / 2021M**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftakhul Huda
NPM : 1721010129
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN (ANALISIS PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD DAN MUSDAH MULIA)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telahdirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,
Penulis,

Miftakhul Huda
NPM. 1721010129



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Miftakhul Huda
NPM : 1721010129
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : Kesaksian Perempuan Dalam Pernikahan
(Analisis Pemikiran Husien Muhammad dan
Musdah Mulia)**

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. H. Erina Pane. S.H., M.Hum.
NIP. 197005022000032001

Pembimbing II

Dr. Ahmad Fauzan .M.H.I
NIP.20190401199210040001

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Kesaksian Laki-laki dan Perempuan Dalam Pernikahan (Analisis Pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia** disusun oleh **Miftakhul Huda NPM. 1721010129** Program Studi **Hukum Keluarga Islam** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Penguji II : Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Khoiruddin, M.H

NPM. 17210221993031002

ABSTRAK

KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN (ANALISIS PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD DAN MUSDAH MULIA)

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujarat : 13. Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karir professional). Termasuk dalam perkawinan yang mana ada syarat yang harus dipenuhi, salah satunya ada dua orang saksi laki-laki, yang mana sudah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal kesaksian pernikahan masih ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang mana tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, syaratnya menjadi saksi nikah ialah dua orang saksi laki-laki.

Penelitian ini lebih fokus menganalisis pendapat kedua tokoh gender yang aktif dalam hal isu-isu gender yang ada yakni Husein Muhammad dan Musdah Mulia. Peneliti menganalisis pemikiran kedua tokoh tersebut tentang kesaksian dalam pernikahan. penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang berdasarkan yang sudah ada sebelumnya. Yang mana data-datanya diperoleh dari buku-buku Husein Muhammad dan Musdah Mulia dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas. Permasalahan dalam penelitian yaitu: *pertama* Bagaimana pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia tentang kesaksian laki-laki dan perempuan dalam pernikahan; *kedua* bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap pemikiran dari Husein Muhammad dan Musdah Mulia tentang saksi dalam pernikahan.

Hasil dari penelitian ini ialah Husein Muhammad dan Musdah Mulia mengakomodir pemikiran tentang saksi dalam pernikahan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, sebab Husein Muhammad berpendapat manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama, sedangkan Musdah Mulia mendorong isu kesetaraan gender dan pandangan hukum Islam terhadap pendapat kedua tokoh sebut tidak lah bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, hal ini menjadi wajar sebagai bentuk ijtihad kontemporer kedua tokoh tersebut sebagai solusi permasalahan yang ada khususnya terkait kesetaraan laki-laki dan perempuan termasuk dalam kesaksian.

MOTTO

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمٍ وَالشَّهَادَةِ الْغَيْبِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (التَّوْبَةُ : ١٠٥)

Artinya : Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”(Q.S At-Taubah : 105)



PERSEMBAHAN

Terucap Syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt, adalah zat yang maha segala-galanya atas segala limpahan berkah, nikmat perlindungan dan kemudahan dalam menjalani setiap langkah kaki ini. Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua ku yang tercinta Bapak Sunaryo dan Ibu Jumiati yang senantiasa selalu mendo'akan dalam setiap waktunya selalu memberikan semangat, nasehat bimbingan, perhatian serta dukungan. Semoga kelak anak mu ini dapat menjadi anak yang membanggakan untuk kalian berdua dan semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Skripsi ini adalah persembahan kecil dari anakmu.
2. Teruntuk kakakku Wawan Suyanto S.kom, Emi Sucianti Amd.Keb, Agung Harry Prastio S.I.K dan Adikku Lutfiah yang telah memberikan semangat, motivasi selama aku kuliah dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah Swt senantiasa memberi nikmat sehat kepada kita semua.
3. Almamater kebanggaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan di kampus ini kelak menjadi manusia yang bermanfaat serta berkah dan diridhoi Allah Swt.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 13 Mei 1998 di Bukit Kemuning, Lampung Utara. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Sunaryo dan Ibu Jumiati. Penulis menempuh Pendidikan formal dari mulai jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Pertiwi Bukit Kemuning pada tahun 2003, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 3 Bukit Kemuning pada Tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Bukit Kemuning pada tahun 2011, pada saat itu pindah kesekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Way Kanan pada taun 2012 dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan jenjang Pendidikan sekolah menengah atas di MA AL MA'Arif Serupa Indah dan lulus pada tahun 2016.

Pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam program Strata 1 (S1) melalui jalur (Ujian Mandiri). Dan penulis juga ikut menjadi jajaran pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Permata Sholawat UIN Raden Intan Lampung tahun 2019-2020.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat beserta salam selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad Saw yang senantiasa menjadi panutan bagi umat manusia. Penulis berterimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini dengan judul :“ ***Kesaksian Laki-laki dan Perempuan Dalam Pernikahan (Analisis Pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia)***” guna melengkapi Sebagian persyaratan ujian munaqosyah dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Hanya kepada Allah penulis memohon semoga segala bantuan dan amal baik yang mereka berikan kepada penulis memperoleh pahala yang berlipat ganda serta selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

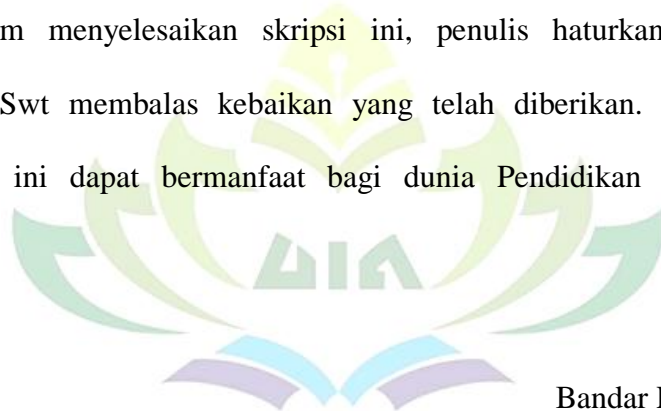
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. Moh. Mukri., M.Ag. Beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H. Beserta jajarannya.
3. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah H. Rohmat, S. Ag. ,M.H.I serta sekretaris jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Dr. Abdul QodirZaelani, M.A. di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang penuh kesabaran

4. Dr. H. Erina Pane. S.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya dalam memberi masukan, motivasi, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Ahmad Fauzan, M.H.I. selaku pembimbing II yang juga telah bersedia membagi waktu ditengah kesibukan untuk membimbing dan mengarahkan dengan ikhlas dan sabar, memotivasi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Syar'iah UIN Raden Intan Lampung. Terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama ini
7. Tiara Novita Sari S.Pd terimakasih atas waktu, dukungan, motivasi, semangat yang selalu diberikan, dan support sistem dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan ku Angkatan 2017 Khususnya kelas E.terimakasih telah menjadi bagian dalam kisah hidup, dan memberikan pengalaman serta pembelajaran hingga akhir.
9. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Permata Sholawat, terimakasih telah menjadi tempat pembelajaran penting diluar kelas dan segala pengalaman yang telah diberikan.
10. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang ku kenal semasa hidupku. *Jazakumullah* Semoga amal ibadah dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan

yang lebih baik lagi dari Allah Swt. Saya sadar dan mengakui bahwa penulisan

skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan sarannya yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin YaRobbal 'alamin.

Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis haturkan terimakasih. Semoga Allah Swt membalas kebaikan yang telah diberikan. Penulis harap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia Pendidikan dan pembaca khususnya.



Bandar Lampung,

Miftakhul Huda
NPM. 1721010129

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Saksi Nikah Dalam Hukum islam	13

B. Saksi Nikah Menurut Hukum Positif.....	29
C. Hukum Kesetaraan dalam Islam.....	39

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Saksi Nikah Prespektif Husein Muhammad	45
B. Saksi Nikah Prespektif Musdah Mulia.....	48

BAB IV ANALISI DATA

A. Analisis Pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia Tentang Kesaksian Perempuan dalam Pernikahan	53
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Kesaksian Laki-laki dan Perempuan Dalam Pernikahan Menurut Husein Muhammad dan Musdah Mulia	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah untuk memperjelas pokok bahasan. sehingga dalam penegasan judul, peneliti dirasa perlu menguraikan dan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi, maka peneliti membatasi arti kalimat dalam judul skripsi. Adapun judul Proposal yang peneliti angkat adalah “*Kesaksian Perempuan dalam Pernikahan (Analisis Pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia)*” berikut ini adalah penjelasan secara singkat dari judul di atas :

1. Kesaksian

Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau orang yang mengetahui”. Kata saksi dalam bahasa Arab adalah *syahadah* yaitu orang yang mengetahui, yang menerangkan apa yang diketahuinya pada saat memberikan kesaksian.¹

2. Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *An-Nika'h* adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

3. Pemikiran

Pemikiran merupakan sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling.³ Pemikiran juga bisa disebut sebagai gagasan dan proses mental. Berfikir memungkinkan manusia untuk mempresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadapnya secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan.

4. Husein Muhammad

Husein Muhammad merupakan salah satu tokoh gender dimana gagasan-gagasan pembaharuannya sangat brilian dan diapresiasi oleh banyak kalangan khususnya dari kalangan yang memperjuangkan kesetaraan gender. Ia aktif diberbagai kegiatan diskusi dan seminar

¹ Al-Anshari, *Lisan Al- 'Arab*, (Kairo: Dar Al-Mishri, t.t), Juz VII, h.222

² Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ *Ibid*,

keislaman. Ia juga menulis disejumlah media massa dan menerjemahkan sejumlah buku.⁴

5. Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia adalah intelektual dan sekaligus aktivis perempuan yang bersikap sangat kritis dan berani menentang arus mayoritas yang tidak rasional dan tidak humanis demi mewujudkan Islam *rahmatan lil alamimin*, sekaligus membangun bangsa yang adil dan makmur, dan beradab. Agama, bagiannya tidak sepantasnya hanya dipahami secara simbolik dan terpaku pada hal-hal yang sifatnya artifisial. Agama, kalau begitu harus membimbing manusia untuk lebih bersifat manusiawi.⁵

Berdasarkan penegasan judul di atas maka dapat dipahami bahwa, penelitian ini membahas tentang pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia tentang kesaksian perempuan dalam pernikahan dengan perspektif hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istrinya.⁶ seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah Swt Q.S Al-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ: ٢١)

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S al-Rum[30]:21)

⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Ircisod, 2019).

⁵ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta, Pt Elex Media Komputindo Kompas- Gramedia 2014)

⁶ Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, (Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja : 2018).

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dari jenis manusia itu sendiri, agar ia mempunyai rasa saling mencintai dan merasa tentram saat bersamanya setelah menikah. Oleh karena itu tidak ada rasa cinta dan sayang melebihi seperti yang terdapat dalam pernikahan. Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 perkawinan diartikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷ Sedangkan menurut kompilasi hukum islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizhan* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah.⁸

Menurut Muhammad Amin Suma, paling tidak menurut sebagian ahli hukum, di antaranya Sayuti Thalib dan Mohd. Idris Ramulyo, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu:

1. Perkawinan dari segi sosial.
2. Perkawinan dari segi hukum.
3. Perkawinan dari segi agama

Perkawinan dari segi sosial ialah bahwa dalam setiap masyarakat (bangsa), ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga (dianggap) mempunyai kedudukan yang lebih dihargai (terhormat) dari mereka yang tidak menikah. Adapun perkawinan dari segi hukum dipandang sebagai suatu perbuatan (peristiwa) hukum, yakni perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Sedangkan perkawinan dari sudut pandang agama (khususnya Islam) merupakan sesuatu hal yang dipandang suci (sakral).

Oleh sebab itu, perkawinan tidak hanya persoalan perbuatan hukum dan memiliki penghargaan sosial di mata masyarakat, akan tetapi lebih dari itu, perkawinan juga memiliki nilai-nilai ibadah. Dengan demikian agama Islam telah menetapkan tata aturan pernikahan berikut hal-hal yang terkait dengannya sedemikian rupa dan meletakkan dasar-dasar pergaulan hidup dan hubungan suatu keluarga yang terbentuk akibat dari pernikahan itu sendiri.⁹

Pernikahan dikatakan ibadah ketika telah memenuhi rukun pernikahan, agar pernikahan dapat dikatakan sah. Adapun rukun nikah yaitu terdapat mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dan dua orang saksi laki-laki

⁷ Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Ressindo, 2018)

⁹ Muhammad Amin Sayyad, “*Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution)*”, No.1 (2018)

serta ijab qabul.¹⁰ Salah satu dari rukun pernikahan yakni adanya dua orang saksi laki-laki, didalam hal kesaksian perlu adanya seorang saksi yang hadir disaat ijab qabul diucapkan, karna peran saksi sangatlah penting dalam pernikahan untuk mengetahui adanya ijab dan qabul sehingga tidak menimbulkan fitnah. Adanya saksi dalam pernikahan sudah dijelaskan di dalam Q.S al Talaq (65) : 2

فَإِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ (الطلاق: ٢)

Artinya:“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.”(Q.S al-Talaq [65]:2

Pada Tafsir *Adz-Dzikraa* menafsirkan yang pertama maksud diadakan saksi, supaya tidak timbul kericuhan jika terjadi hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Misalnya jika si suami meninggal, lalu pihak ahli warisnya dapat saja mengatakan bahwasang suami (almarhum) tidak merujuk istrinya. Dengan demikian si istri tidak menerima warisan , atau istri almarhum dapat pula mengatakan bahwa suaminya tidak merujuknya, dengan maksud supaya iddahnya cepat berakhir dan kawin lagi dengan laki-laki lain. Kedua Maksudanya, bertakwalah kepada Allah, dan taatilah hukum-hukum Allah sebagaimana yang tersebut pada ayat di atas.¹¹

Di dalam ayat ini, dengan adanya saksi dalam perkawinan ini akan dapat dijadikan sebagai alat bukti akan dapat menghilangkan keragu-raguan dan juga dengan keyakinan masyarakat terhadap telah berlangsungnya akad nikah. Mayoritas ulama khususnya empat Imam Madzhab mengemukakan bahwa saksi dalam pernikahan itu harus dua orang laki-laki, namun, di antara ulama itu ada yang membuka peluang bagi sahnya wanita menjadi saksi dalam pernikahan. Namun demikian, pada realitanya, kesaksian wanita dalam pernikahan tidak pernah dijumpai karena Kompilasi Hukum Islam tidak membolehkannya. Hal ini bertolak belakang dengan pendapat Musdah Mulia

¹⁰ Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, (Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja : 2018).

¹¹ Bactiar Surin. *Adz Dzikraa Terjemah dan Tafsir Al-quran*. (Bandung. Penerbit Angkasa Bandung. 1991).

yang menyatakan bahwa “Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia”, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki.

Karena itu, Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, terutama terkait relasi gender. Tidak berbeda jauh dengan pendapat Musdah Mulia, Husein Muhammad menyatakan bahwa “sebagai manusia, perempuan memiliki seluruh potensi kemanusiaan sebagaimana dimiliki laki-laki. Dengan kata lain, sebagaimana halnya laki-laki, perempuan memiliki kekuatan fisik, akal pikiran, kecerdasan intelektual, kepekaan spiritual, Hasrat seksual, dan sebagainya. Potensi-potensi (*al-Quwa*) kemanusiaan tersebut diberikan Tuhan kepada semua manusia yang hidup dimana pun dan kapan pun sebagai prasyarat menjalankan amanat Tuhan, yaitu mengelola dan memakmurkan bumi dan alam.”¹²

Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Juga supaya suami tidak menyia-nyiaikan keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan *tuhmah* (persangkaan jelek), seperti kumpul kebo. Kehadiran saksi dalam akad nikah, adalah sebagai penentu sah akad nikah itu. Saksi menjadi syarat sah akad nikah.¹³

Adapun mengapa peneliti memilih Husein Muhammad dan Musdah Mulia untuk dianalisis pemikiran kedua tokoh tersebut tentang kesaksian perempuan dalam pernikahan ialah, yang pasti setiap tokoh mempunyai pandangan masing-masing terhadap apa yang ia pelajari dan setiap tokoh pasti memiliki kelebihan masing-masing. Husein Muhammad merupakan salah satu tokoh gender di Indonesia ia sangat aktif dalam gerakan keadilan untuk perempuan atau bisa dikatakan kesetaraan laki-laki dan perempuan, Husein Muhammad juga memahami ilmu-ilmu tauhid sebagai perwujudan terhadap hak-hak manusia yang pada dasarnya apa pun itu latar belakang manusia itu sama dan berasal dari satu sumber yakni ciptaan Allah Swt.

Sedangkan Musdah Mulia merupakan tokoh gender yang kritis terhadap hak-hak perempuan. Musdah Mulia juga ingin menegaskan dan menegaskan keadilan bagi kaum perempuan yang mana menurutnya masih banyak sekali diskriminasi terhadap kaum perempuan dari berbagai aspek yang ada. Ia juga banyak menulis buku-buku yang berkaitan dengan keadilan bagi perempuan agar apa yang ingin dia sampaikan bisa tanggap oleh pemerintah ini lah satu cara Musdah Mulia memperjuangkan keadilan gender di Indonesia. Maka dari

¹² Husein Muhammad dan Mamang Muhammad Haerudin, *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014).

¹³ Mahmud Efendi Nur, “Wali dan Saksi Dalam Pernikahan”. *ejurnal.unsurakarta*. No. 34 (2014).

itu peneliti tertarik kepada kedua tokoh gender tersebut untuk di analisis pemikirannya tentang kesaksian dalam pernikahan.

Permasalahan tentang kesaksian dalam pernikahan perlu dibahas dan perlu dikaji lebih mendalam karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana kesetaraan kesaksian laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Maka perlu adanya penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan yang diangkat perlu dibatasi fokus penelitiannya yaitu:

1. Pandangan hukum islam tentang kesaksian perempuan dalam hukum Islam dalam pernikahan
2. Pandangan kedua tokoh gender tentang kesaksian perempuan dalam pernikahan

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat peneliti rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia tentang kesaksian perempuan dalam pernikahan ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang kesaksian perempuan dalam pernikahan menurut Husein Muhammad dan Musdah Mulia ?

E. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kesaksian laki-laki dan perempuan dalam pernikahan menurut pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang kesaksian antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan menurut Husein Muhammad dan Musdah Mulia.

F. Manfaat Penelitian

Adapun signifikansi penelitian dalam judul ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah kesaksian dalam pernikahan dikalangan masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memecahkan masalah terkait pandangan Husein Muhammad dan Musdah Mulia tentang kesaksian perempuan dalam pernikahan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	Judul Skripsi	Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Sistem Peradilan (Studi Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam)	Andi Sharfiah Mustari , 2017	Membahas kedudukan saksi perempuan dalam hukum islam, menggunakan penelitian pustaka, sumber data yang diperoleh dari sumber hukum sekunder, primer, tersier, yang diolah dengan identifikasi reduksi dan editing serta dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan mendapat kesimpulan dari permasalahan	Analisis data yang diperoleh berbeda, dengan apa yang diteliti oleh penulis.
2	Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Saksi Perempuan dalam Pernikahan	Abdul Rahman, 2017	Membahas saksi perempuan dalam pernikahan, menggunakan penelitian pustaka, sumber data yang diperoleh dari sumber hukum sekunder, primer, tersier, yang diolah dengan identifikasi reduksi dan editing serta dianalisis	Pemikiran tokoh yang berbeda dapat mempunyai pandangan yang sedikit berbeda walau dalam garis besarnya adalah sama tentang kesetaraan dan keadilan

			secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan mendapat kesimpulan dari permasalahan	untuk perempuan.
3	Kesaksian Wanita dalam Pernikahan (Analisis Komparatif terhadap Empat Mazhab)	Afniadi, 2009	Membahas saksi perempuan dalam hukum Islam, menggunakan penelitian pustaka, sumber data yang diperoleh dari sumber hukum sekunder, primer, tersier, yang diolah dengan identifikasi reduksi dan editing serta dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan mendapat kesimpulan dari permasalahan	Analisi yang berbeda jelas akan menimbulkan hasil yang berbeda. Kemajuan dan perkembangan saat ini wanita mulai berperan lebih dari pada saat itu yang hanya menjadi ibu rumah tangga. Tentunya pendapat dari empat mazhab tersebut berbeda dengan apa yang di analisis oleh penulis. Maka dapat menimbulkan hasil yang berbeda nantinya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan Langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁴

1. Jenis dan Sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Pustaka (*Library Research*) hampir semua penelitian selalu berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Ilmuwan memulai penelitiannya dengan cara mengutip apa yang sudah dikemukakan oleh para ahli lain. Penelitian memanfaatkan teori-teori yang sudah ada dibuku atau hasil penelitian lain untuk kepentingan penelitiannya.¹⁵

b. Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, pengertian deskriptif ialah penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan atau memaparkan data-data yang berkaitan erat tentang bagaimana pemikiran Husein Muhammad dan Musda Mulia tentang kesaksian laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti.¹⁶ Adapun sumber data primer ini berasal dari buku-buku Musda Mulia (Indahnya Islam menyuarakan kesetaraan dan

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung, CV Alfabata, 2017).

¹⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.

¹⁶ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).

keadilan gender, Muslimah reformis, Kemuliaan Manusia Dalam Islam,) dan Husein Muhammad (*Fiqih Perempuan, Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan, Menuju Fiqih Baru, Poligami*) permasalahan kesaksian perempuan dalam pernikahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam bentuk dokumen dan publikasi.¹⁷ Peneliti berupaya mencari data yang bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan kesaksian laki-laki dan perempuan dalam pernikahan pada berbagai referensi seperti buku-buku, modul, majalah, surat kabar, youtube dan bahan lainnya yang terkait.¹⁸ Dalam hal ini peneliti menjadikan Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Jurnal dan buku penunjang lainnya sebagai data sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data penunjang dari kedua data di atas yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia, dan lain sebagainya yang masih ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengelolaan Data

Dari data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian ini diolah dan analisa dengan menggunakan suatu pengolahan data yang diantaranya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing adalah meneliti data-data yang diperoleh jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna kesesuaian dengan data yang lain.¹⁹ Merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data yang dikumpulkan, kevaliditasan data yang telah diperoleh tersebut dan relevansinya dari data-data yang diperoleh berdasarkan pada studi literatur yang berkaitan terhadap suatu penelitian.

b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan dipersentasikan.

c. Sistematisasi Data (*systematizing*)

¹⁷ *Ibid*, 57.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Dan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).

¹⁹ Abu Ahmad dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005)

Sistematikasi data merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam menempatkan data, yang menurut data atau kerangka sistematika bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.²⁰

4. Analisis Data

Analisis penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang dibahas akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai akhir penelitian.²¹ Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesa.²² Penulis akan menganalisisnya secara kualitatif bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini ialah dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah yang berfikir dari fakta-fakta yang khusus dan pristiwa kongkrit, kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.²³ Dengan metode ini peneliti dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul, dengan metode ini juga data yang dianalisa akan mendapatkan jawaban yang benar dari permasalahan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membagi dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan. Bab ini mencakup penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Bab kedua, menjelaskan tentang kesaksian perempuan dalam pernikahan. Memuat empat sub bab. Sub-bab pertama saksi nikah dalam hukum Islam. Sub-bab kedua menjelaskan saksi dalam hukum positif. Sub-bab ketiga menjelaskan hukum kesetaraan dalam. Dalam bab ini akan dijelaskan beberapa pendapat tentang kesaksian perempuan dalam pernikahan, menurut beberapa pandangan ulama klasik dan kontemporer. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan kesaksian perempuan dalam pernikahan dapat disajikan secara utuh.

²⁰Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995).

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabete, 2012).

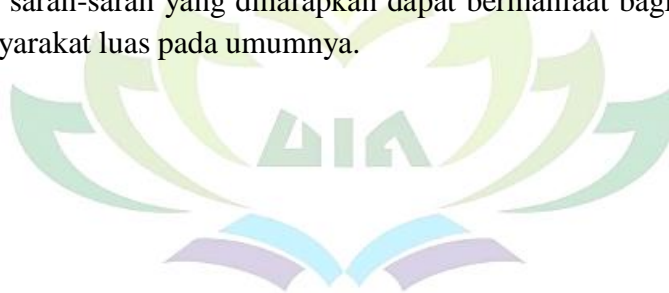
²²*Ibid.* .

²³ Deddy Mulyana, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Permata Rosadakarya, 2010).

Bab ketiga, menjelaskan pandangan Husein Muhammad dan Musdah Mulia tentang kesaksian perempuan dalam pernikahan. Terdiri dari dua sub-bab. Sub-bab pertama tentang biografi Husein Muhammad, yaitu riwayat hidup dan pendidikan, corak pemikiran Husein Muhammad, karya-karya Husein Muhammad, serta pandangan Husein Muhammad tentang kesaksian perempuan dalam. Sub-bab kedua tentang biografi Imam Musdah Mulia, yaitu riwayat hidup dan pendidikan, corak pemikiran Musdah Mulia, karya-karya Musdah Mulia, serta pandangan Musdah Mulia tentang kesaksian perempuan dalam pernikahan.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia tentang kesaksian perempuan dalam pernikahan. Bab ini dimulai dari membahas relasi kesaksian perempuan khususnya dalam pernikahan, menjelaskan persamaan pandangan Husein Muhammad dan Musdah Mulia tentang saksi perempuan dan istinbath hukum yang digunakan dan mengkaji pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia untuk diimplementasikan dalam masyarakat.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM SAKSI NIKAH

A. Saksi Nikah Dalam Hukum Islam

1. Saksi Menurut Hukum Islam

a. Pengertian saksi

Dalam hukum Islam alat bukti saksi disebut dengan *syāhid* (saksi laki-laki) atau *syāhidah* (saksi wanita), yang terambil dari kata *musyāhadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dan saksinya adalah manusia hidup. Yang dimaksud dengan *syahādah* adalah keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. Oleh karena itu, dalam pengertian kesaksian dapat pula dimaksudkan kesaksian yang didasarkan atas hasil pendengaran, seperti kesaksian atas kematian.¹

Kata saksi juga berarti kesaksian atau bukti kebenaran. Kesaksian artinya keterangan atau bukti pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat. Sedangkan menurut syara' pada umumnya yang diutarakan adalah definisi kesaksian. Kesaksian menurut bahasa Arab adalah *asy-syahadah* ialah mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain

Dalam kamus Istilah fikih, "Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat".²

Dalam mempergunakan saksi di muka sidang pengadilan agama hendaknya kita tahu membedakan apakah saksi syarat hukum ataukah sebagai alat pembukian, sebab fungsi keduanya itu berbeda. Sebagai misal, dua orang saksi adalah sebagai syarat hukum untuk sahnya perkawinan, namun untuk membentuknya adanya perkawinan tidak mesti dengan dua orang saksi betul, melaikandapat dengan cara lain, seperti:

- 1) Dengan pengakuan kedua suami-istri dengan sumpahnya,
- 2) Dengan adanya saksi nikah,

¹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012).

² M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994).

- 3) Dengan seorang saksi ditambah sumpah dari salah seorang suami-istri dimaksudkan,
- 4) Hal-hal di atas ini diakui sendiri oleh para ahli hukum.³

Kedudukan saksi dalam perkawinan menurut mazhab empat ialah akad pernikahan sudah semestinya disaksikan Oleh dua orang saksi demi terwujudnya kepastian hukum serta menghindari sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari. Ulama mazhab empat sepakat bahwasanya wali menjadi syarat sahnya pernikahan, maka tidak sah dua saksi selain wali, dengan dalil sebagai berikut :

Akan tetapi dalam literatur lain ditemukan perbedaan sebagai berikut :

- a) Ulama Shafi'iyah dan Hanabilah
menempatkan saksi sebagai rukun dalam pernikahan.
- b) Ulama Hanafiyah
menempatkan saksi sebagai syarat
- c) Ulama Malikiyyah

Menurut riwayatnya Ahmad tidak memasukkan saksi dalam rukun dan syarat, tetapi wajib menghadirkan dua saksi ketika berhubungan intim. Jika tidak mendatangkan dua saksi maka pernikahannya rusak dengan bentuk talaq bain, karena akad pernikahannya adalah akad yang sah. Karena jika tidak mewajibkan menghadirkan saksi secara mutlaq akan membuka jalan perzinahan.⁴

Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi (*syahadah*) adalah (orang yang) yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami, disaksikan dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang disengketakan di depan sidang pengadilan dengan kata khusus yakni dimulai dengan sumpah terlebih dahulu.

Hakim tidak boleh percaya begitu saja terhadap keterangan saksi. Harus diperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan napa yang dikehui dari alat bukti lain atau dari keterangan-keterangan lainnya atau dengan kelogisan, juga perlu diperhatikan segi lainnya yang lebih meyakinkan seperti

³ Roihan A.Rasyid, "*Hukum Acara Peradilan Agama*", (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2015).

⁴ Al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madhahib al-Arba'ah*, Vol. 4 (2004).

cara saksi bersikap dan berkaa di depan sidang, cara hidup dan lingkungan kehidupan sehari-hari, kedudukan saksi di tengah masyarakatnya dan sebagainya, karena hal ini sulit didetilkkan, diserahkan sepenuhnya kepada intelegensia hakim, sebagai pertanggung jawabnya kepada Tuhan dan Negara. Peradilan agama lebih-lebih lagi bahkan harus diperhatikan apa agama saksi, bagaimana ketaatan dalam agamanya, fasiq atau tidak dan sebagainya.⁵

Pemeriksaan saksi di depan sidang selalu diusahakan turut di dengar oleh kedua belah pihak yang berperkara dan setiap saksi selesai memberikan keterangannya, hakim perlu menanyakan kepada pihak lawannya (terutama) apakah ada keberatan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan dari dan kepada saksi.⁶

Pemeriksaan saksi dilakukan dengan dipisahkan satu persatu supaya saling terhindar dari saling memengaruhi atau kerjasama /sekongkol tetapi ada hal yang perlu dihubungkan dari satu keterangan dengan keterangan lainnya, yang menurut hakim lebih baik, boleh saja diperiksa bersamaan.⁷

Saksi mestilah benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya, bukan berdasarkan cerita dari mulut kemulut atau dari pendengaran ke pendengaran, lalu saksi menyusun atau mengambil kesimpulan atau memberikan penilaiannya sendiri.⁸

Saksi tidak boleh menyimpulkan apa yang disaksikannya itu melainkan menerangkan apa-adanya menurut aslinya, tetapi saksi harus menyebutkan sebab ia mengetahui demikian, misalnya saksi tau farida dan karim menikah karena dilakukan di rumah di sebelah rumah saksi dan saksi hadir, jadi idak cukup saksi menerangkan hanya tahu saja.⁹

⁵ Roihan A.Rasyid, "*Hukum Acara Peradilan Agama*", (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2015)..

⁶ *Ibid* h.169.

⁷ *Ibid* h. 169.

⁸ Roihan A.Rasyid, "*Hukum Acara Peradilan Agama*", (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2015).

⁹ *Ibid*.

b. Dasar Hukum Saksi Nikah

Adapun dasar hukum saksi adalah sebagai berikut :

1) Al-Qur'an

Di dalam surat Al-Baqarah ayat (282) disebutkan :

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكُنُّوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ (البقرة: ٢٨٢)

Artinya: Persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. (QS Al-Baqarah: 282)

Dalam tafsir *fi Zhilalil Qur'an* harus dua orang saksi terhadap akad (transaksi) itu “dari saksi-saksi yang diridhoi”. ‘Ridha’ disini mengandung dua makna. Pertama, kedua orang saksi itu adil dan di ridhoi di kalangan jamaah (masyarakat). Kedua, kedua belah pihak ridho terhadap kesaksiannya. Akan tetapi, ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak mudah mendapat dua saksi laki-laki. Maka, dalam kondisi seperti ini syariat memberikan kemudahan dengan menjadikan perempuan sebagai saksi.

Sebenarnya, syariat mengutamakan laki-laki karena biasanya merekalah yang melakukan tugas-tugas besar di kalangan masyarakat Islam. Sedangkan, wanita tidak perlu turut serta karena akan dapat menghilangkan keibuannya, kewanitaannya, dan kewajibannya dalam menjalankan tugas kemanusiaan yang lebih berharga, yaitu memelihara pertumbuhan anak-anak yang akan menjadi generasi masa depan. Padahal, dengan bekerja dia hanya mendapat beberapa suap makanan atau sedikit uang, sebagaimana kondisi masyarakat sekarang ini yang sudah amburadul kehidupannya. Adapun jika tidak didapati dua orang laki-laki, bolehlah saksi itu seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Akan tetapi, mengapa dua orang perempuan ? Sesungguhnya nash ini tidak membiarkan kita hidup dalam menduga-duga. Maka, dalam lapangan

tasryi' perbuatan peraturan/ hukum' semua nashnya terbatas, tetapi jelas, dan mengemukakan *illat'* sebab hukum.¹⁰

Disamping itu dalam surat An Nisa ayat (135) Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا
وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعِصُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: ٥)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.(An-Nisa : 135)

Sayyid Qutbh menafsirkan ini adalah amanat untuk menegakkan keadilan secara mutlak, dalam semua keadaan dan lapangan. Keadilan yang mencegah kesewenang-wenangan dan kezaliman, keadilan yang menjamin kesamaan di antara manusia dan memberikan hak kepada masing-masing yang punya hak, baik muslim maupun nonmuslim. Karena dalam hak ini samalah disisi Allah antara orang-orang mukmin dan orang-orang yang beriman, antara kerabat dan orang jauh (bukan kerabat), antara kawan dan lawan, serta antara orang kaya dan orang miskin. “jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah”.

Melakukan perhitungan karena Allah, bergaul langsung dengan-Nya, bukan karena memperhitungkan seseorang dari yang diberikan kesaksian untuknya (yang menang) atau atasnya (yang kalah), dan bukan pula karena kepentingan pribadi, kelompok, atau umat. Juga tidak terpengaruh oleh kondisi yang meliputi unsur-undur peradilan. Akan tetapi mereka memberikan kesaksian karena Allah, dan

¹⁰ Sayyid Qutbh. *Fi Zhilalil-Qur'an*. (Jakarta. GEMA INSANI. 2004). h 392-393

bermuamalah dengan Allah, lepas dari segala kecendrungan, dari semua keinginan, kepentingan dan anggapan.¹¹

Masih banyak lagi ayat dan hadis tentang saksi tapi ayat disebutkan di atas adalah menjadi dasar umumnya, yaitu saksi itu secara umum terdiri dari dua orang lelaki atau seorang lelaki Bersama dua orang perempuan, yang beragama Islam.

Kebanyakan ahli hukum Islam (*jumhur fuqaha'*) menyamakan kesaksian (*syahadah*) itu dengan bayyinah. Apabila saksi disamakan dengan *bayyinah* berarti pembuktian di muka peradilan islam, termasuk di muka Peradilan Agama hanya mungkin dengan saksi saja, sebab Rasulullah mengatakan “*al-bayyinah ‘ala al-mudda’y wa alyamin ‘ala man ankar*”. Bagi kaum feminis, kesaksian perempuan didalam islam yang di nilai setengah dari kesaksian laki-laki berujung diskriminasi terhadap perempuan disektor publik. Dalam Islam hukum melaksanakan kesaksian adalah *fardu kifayah*, termasuk kesaksian yang dilakukan perempuan. Kesaksian perempuan diterima dalam segala perkara yang tidak mungkin disaksikan laki-laki secara mutlak.¹²

Ada ahli hukum Islam yang mengarikan *bayyinah* itu sebagai segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu, misalnya ibn al-Qayyim al Jauziyah dalam kitabnya *At-Turuq al-Hukmiyah*. Pengertian ini berarti bahwa kesaksian hanya merupakan sebagian dari *bayyinah*. Sehubungan dengan pembuktian, rasanya pengertian yang terakhir inilah yang tepat dipergunakan.

2). Al-Hadis

Meskipun Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit keberadaan saksi dalam perkawinan, tapi ulama sepakat saksi sebagai syarat dalam pernikahan karena dalam beberapa hadis telah disebutkan kedudukan saksi dalam perkawinan. Setelah peneliti lakukan penelusuran melalui penelitian terdahulu dan

¹¹ Sayyid Quthb. *Fi Zhilalil-Qur'an*. (Jakarta:gema insani. 2004).

¹² Shalahudin. *Konsep Kesetaraan Dalam Kesaksian Perempuan Antara Prespektif Wahyu dan Prespektif Gender*. Jurnal *Tsaqafah*. No 2. Vol 12. 2016

dokumen hadis, ditemukan beberapa hadis tentang kesaksian perempuan. Setidaknya ada tiga klasifikasi hadis membicarakan tentang saksi yang penulis temukan.¹³

Dalam kategori ini, riwayat yang populer adalah riwayat yang disampaikan oleh Abu 'Ubaidah atau disebut juga dengan Abu 'Ubaid saja, mengenai larangan perempuan menjadi saksi dalam tiga perkara, yakni hudud, thalak, dan nikah. Riwayat ini sangat populer dikalangan kelompok yang berpendapat bahwa perempuan tidak digunakan kesaksiannya dalam pernikahan bahkan banyak masyarakat yang mengiranya sebagai Hadis Nabi. Riwayat ini merupakan atsar yang disampaikan oleh Abu 'Ubaid dan saat ini banyak kalangan yang menganggap bahwa riwayat ini adalah hadis Nabi. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.⁴ Adapun dalam hadis,

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهُدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا) (رواه مسلم)

Artinya: Dari Zaid Ibnu Kholid al-Juhany bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Maukah kalian aku beritahu sebaik-baik persaksian? Yaitu orang yang datang memberi saksi sebelum diminta persaksiannya." (Riwayat Muslim).¹⁴

Pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab Shahih al-Bukhārī berikut ini:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَيْدُ هَوَائِنَا سَلَّمَ عَنْ عُبَيْضِ بْنِ عَبْدِ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "خَرَجَ رَسُولُ فِي

¹³ Abdul Malik Syafe'I, "Dekonstruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan Dalam Perkawinan", No 2, Vol 11, (2016).

¹⁴ al-Imam Muslim, Shahih Muslim, terj. Ma'mur Daud, Terjemah Hadis Shahih Muslim, Jilid II (Jakarta: Klang Book Centre, 1982),

أَضْحَىٰ أَوْ فَطَرَ إِلَىٰ آلِ مُصَلَّىٰ فَمَرَّ عَلَى النَّسَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أَرِيتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ: وَبِ مَيَّارِ سُوْلَا قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَكُفْرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَ دِينَ أَذْهَبَ إِلَى الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ: وَمَا نَقَصَانِ دِينَنَاوَعَقْلَنَايَا رَسُولَا قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ: بَلَى قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضْتُمْ تُصَلُّونَ ثُمَّ تَصُومْنَ قُلْنَ: بَلَى قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ دِينِهَا (رواه

Artinya: “Telah berkata kepada kami Sa’id bin Abi Maryam berkata: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja’far berkata; mengabarkan padaku Zaid putra Aslam dari ‘Iyadh bin Abdillah dari Abi Sa’id al-Khudri berkata, Rasulullah SAW keluar pada waktu Idul Adha dan Idul Fitri ke tempat salat, kemudian beliau melewati sekelompok perempuan, beliau bersabda: ‘Wahai perempuan perbanyaklah bersedekah, karena sesungguhnya aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah golongan kalian.’ Maka perempuan tersebut berkata: ‘Apa yang menyebabkan hal itu ya Rasulullah?’ Rasulullah menjawab: ‘Kalian banyak mencaci dan tidak mensyukuri suami, aku tidak melihat yang kurang akal dan agamanya yang tidak dimiliki oleh laki-laki selain kalian’ perempuan itu bertanya: ‘Apa kekurangan akal dan agama kami’ beliau menjawab: ‘Bukankah kesaksian perempuan seperti setengah dari kesaksian laki-laki?’ ia menjawab: ‘Benar ya Rasulullah’ Rasulullah berkata: ‘Itulah kekurangan akalnya, dan bukankah disaat haid, perempuan tidak salat dan tidak puasa?’ ia menjawab: ‘Benar ya Rasulullah’ maka Rasulullah menjawab: ‘itulah kurang agamanya¹⁵’.

2) Syarat-Syarat Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun dalam pelaksanaan akad, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Keberadaan saksi saat akad wajib dan harus dihadirkan karena saksi merupakan saah satu

¹⁵ Al-Bukhari, S{ah}ih al-Bukhâri, Bâb “Tark al-H{âid al-S{aum}”, Jil. 1, 68, dan Bâb “Syahâdat al-Nisâ”, Jil. 3, 173. Hadis semisal juga terdapat dalam kitab-kitab hadis lainnya, antara lain; (a) Muslim, S{ah}ih Muslim, Bâb “Bayân Nuqsân al-Îmân”, Jil. 1, 86, (b) Abu Dawud, Sunan Abî Dâwûd, Bâb “al-Dalîl ‘alâ Ziyâdat al-Îmân”, Jil. 4, 219, (c) al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, Bâb “Mâ Jâ’a fî Istikmâl al-Îmân”, Jil. 5, dalam Ahmad Muhammad Syakir, Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi dan Ibrahim ‘Atwah ‘Iwad (Eds.), (Mesir: Syarikah Maktabah wa Mat{ba}’ah Mus{t}afâ al-Bâbi al-H{alabi, 1975), 10, (d) Ibnu Majah, Sunan Ibn Mâjah, Jil. 2, 1326

rukun dalam pelaksanaan akad, apabila tidak ada saksi maka akad dikatakan tidak sah.

Adapun syarat-syarat seorang saksi ialah :

- a) Islam
- b) Laki-laki
- c) Dewasa/baligh
- d) Adil
- e) Dapat mendengar dan melihat

3) Kewajiban Saksi

- a) Kewajiban untuk memberikan kesaksian di persidangan.
- b) Kewajiban untuk melakukan sumpah sebelum memberikan keterangan.
- c) Kewajiban untuk tidak bercakap-cakap selama jalannya persidangan, kecuali pada saat memberikan keterangan.
- d) Kesesuaian Keterangan Saksi

4) Macam-macam Saksi dalam Hukum Islam

Hukum asal saksi sebagai alat bukti, cukup dua orang laki-laki sebagaimana dijelaskan, tetapi dalam beberapa jenis perkara, tampaknya alat bukti itu bervariasi, seperti berikut ini:

- a. Dalam perkara zina atau tuduhan zina, saksinya empat orang saksi yang beragama Islam. Ada tiga alat bukti untuk pembuktian zina, yaitu:
 - 1). Saksi, para ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali empat orang saksi. Ini merupakan *ijma'* para ulama.
 - 2). Pengakuan, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Ibnu Dawud, Abu Šaur, al-Ṭabarī. Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya, Ibnu Abi Lala, Imam Amad dan Ishaq berpendapat bahwa hukuman zina baru bisa dijatuhkan apabila adanya pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda-beda.
 - 3). *Qarīnah* (Indikasi), kehamilan seorang perempuan telah mewajibkan untuk dikenai hukuman *ḥad* jika perempuan tersebut tidak mempunyai suami ataupun pemilik.

Penganut-penganut mahab imam syafi'i dan imam hambali, imam malik dan imam ahmad berpendapat bahwa mereka yang

kurang dari empat orang itu harus dihukum. Dasarnya ialah mengikuti praktek Umar bin Khatab yang menghukum Abu Bakrah, Nafi', dan syibl sewaktu mereka menuduh Mughirah berzina. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan tidak harus dihukum kepada orang yang menuduh, sebab mereka itu hanya berusaha membuktikan kesaksiannya.

- b. Jika menuduh istri sendiri telah berzina (tidak berlaku bagi tuduhan terhadap perempuan selain istri) tetapi tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi lelaki yang beragama Islam, dapat dibuktikan dengan suami mengucapkan sumpah li'an.
- c. Pembuktian saksi bagi wasiat harta dalam perjalanan (musafir) oleh dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, atau boleh seorang laki-laki Bersama dua orang perempuan yang beragama islam semua, atau boleh dua orang laki-laki yang bukan beragama islam, atau oleh seorang laki-laki bersama dua orang perempuan yang semuanya bukan beragama islam.
- d. Pembuktian perkara hudud selain zina, termasuk *hudud qishash* badan atau *qisas* jiwa, dengan 2 orang saksi laki-laki yang beragama Islam.
- e. Pembuktian saksi yang terdiri cukup oleh seorang laki-laki bersama dua orang perempuan yang beragama islam, yaitu dalam perkara harta benda, perkawinan, wasiat, hibah, waqaf, iddah, perwakilan, perdamaian, pengakuan, pembebasan, dan lain-lain yang sejenis itu, yang pada umumnya bersifat hak keperdataan.
- f. Pembuktian dengan perempuan semua, dua orang atau empat orang dalam perkara-perkara yang lazimnya hanya diketahui oleh kaum hawa, seperti entang keperawanan, susuan, kelahiran (termasuk soal bayi yang bersuara atau tidak ketika lahir), cacat-cacat perempuan, dan sebagainya yang sejenis itu. Dasar yang mengatakan dengan 2 orang perempuan karena di jenis perkara seperti itu pengetahuan perempuan sama dengan pengetahuan laki-laki sedang dasar yang mengatakan 4 orang perempuan karena Rasulullah saw, ada yang mengatakan bahwa kesaksian perempuan setengah kesaksian laki-laki.
- g. Pembuktian dengan seorang saksi ditambah sumpah dari pihak yang memiliki saksi itu (*al-yamin ma'a asy-syahid*). Ini pernah

dilakukan oleh Rasulullah saw dalam hal seorang yang mengaku masuk Islam dengan seorang saksi dengan sumpahnya.

- h. Ada pula ahli hukum Islam fuqaha' yang membolehkan pembuktian dengan seorang saksi saja, yaitu dalam kesaksian awal bulan Ramadhan.
- i. Ada pula ahli hukum islam yang membolehkan pembuktian hanya dengan seorang perempuan saja terhadap jenis-jenis perkara yang tersebut di butir 6 di atas.¹⁶
- j. Larangan Untuk Menjadi Saksi

Al-Quran maupun hadis tidak menyebutkan larangan untuk menjadi saksi karena hubungan darah/ hubungan semenda dengan pihak-pihak yang berperkara. Ahli hukum islam ada yang melarang,¹⁷

Larangan ang diatur di lingkungan Peradilan Umum, yang kini juga harus diindahkan oleh Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

- 1. Larangan Mutlak, ialah :
 - a) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut garis keturunan lurus dari salah-satu pihak, kecuali dalam perkara yang menyangkut tentang status keperdataan (sipil) atau perjanjian kerja, yang berkenaan dengan nafkah, pencabutan kekuasaan orang tua atau wali.¹⁸
 - b) Suami atau istri meskipun sudah bercerai.
- 2. Larangan relatif, artinya mereka boleh didenda tetapi idak sebagai saksi, pula tidak perlu di bawah sumpah, yaitu:
 - a) Anak-anak yang belum berumur 15 tahun.¹⁹
 - b) Orang gila sekali pun kadang-kadang sehat
- 3. Mereka yang mempunyai hak ingkar untuk menjadi saksi, atau berhak minta dibebaskan dari saksi yaitu.²⁰ :
 - a) Saudara lelaki atau saudara perempuan dan ipar lelaki dan ipar perempuan.
 - b) Keluarga sedarah menurut garis keturuna lurus dari suami atau istri.

¹⁶ Alau ad-Din, Mu'in al Hukkam, *Mustafa Al-Baby Al-Halaby*, Mesir, 1973. h 246

¹⁷ Roihan A.Rasyid, "*Hukum Acara Peradilan Agama*", (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2015).

¹⁸ HIR, Pasal 145; RBg, Pasal 172; BW, Pasal 1910.

¹⁹ HIR, Pasal 145; RBg, Pasal 172-173; BW, Pasal 1912

²⁰ HIR, Pasal 148; RBg, Pasal 174; BW, Pasal 1909

- c) Orang ang bermartabat, jabatan atau hubungan kedinasan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia seperti dokter, advokat, notaris, polisi dan sebagainya, sepanjang hal itu dipercayakan kepadanya untuk merahasiakan.

2. Nikah Menurut Hukum Islam

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyebutkan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah, yang sudah menjadi hukum alam didunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, dan bahkan tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam surat Yasin ayat (36) bahwa :

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
(يس: ٣٦)

Artinya: Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.(Yasin :36)

Pada Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 juga menjelaskan tentang pernikahan yakni :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum:21)

Menurut *fiqh* pernikahan menjelaskan tentang pernikahan ialah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat. Pernikahan bukan saja merupakan salah satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan, pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan memperluas serta mempererat silaturahmi diantara manusia.

Perkawinan menurut al-Qur'an memiliki beberapa aspek substansial, yaitu syarat dan prosedur menikah. Nikah tak boleh dilakukan, kecuali

sesuai dengan ketentuan Allah Swt. untuk menghalalkan hubungan seksual laki-laki dan perempuan guna memperoleh keturunan sebagai hakikat dan urgensi nikah.²¹ Manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksualitas). Oleh karena itu Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis atau mempertemukan jantan dan betina untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi. Perkawinan yang diajarkan Islam sangat multi aspek, oleh sebab itu memerlukan pembahasan yang lebih komprehensif.²²

Perkawinan dipandang sebagai sakralitas amal atas wujud ketundukan seorang hamba kepada Allah Swt (ibadah) untuk kemudian mampu melanjutkan legalisasi estapet keberlangsungan hidup manusia yang secara fitrah senantiasa mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis. Ketika akad telah diucapkan oleh seorang calon suami, maka di situ terdapat hak dan kewajiban masing-masing mempelai akan berlangsungnya perkawinan setelah akad diucapkan oleh seorang laki-laki.²³

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi syubhat atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasar kondisi syubhat ini dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi Muhammad SAW, lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat.²⁴

Jadi pernikahan ialah merupakan salah satu peristiwa penting di kehidupan manusia dan merupakan suatu ikatan resmi atau sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Sebab tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni : Perkawinan bertujuan untuk

²¹ Syahraeni, *Nikah Prespektif Al-Qur'an*, Jurnal Al-Hikmah, No 2, Vol 19, 2018

²² St Kuraedah, "*Nikah Perspektif Al-Qur'an*", No 1 Vol 19, (2013)

²³ Atus Ludin M dan muhamad Dani Somantri, "*kedudukan saksi non-muslim dalam perkawinan perspektif hukum islam*", No 2, Vol 4 (2019),

²⁴ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*,

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rohmah*.

3. Pendapat Ulama Tentang Kesaksian

Jumhur ulama sepakat bahwa kesaksian seorang laki-laki sama dengan dua orang perempuan, berdasarkan QS. Al-Baqarah (2) ayat 282. Sebagian besar dari mereka juga sepakat tentang keabsahan perempuan dalam kasus perselisihan perdata dalam kasus keuangan. Namun mereka berbeda pendapat tentang kesaksian dalam kasus hukum keluarga.

Hanafi menerima kesaksian perempuan baik perempuan itu sendiri maupun disertai dengan laki-laki. Semetara syafi'i, Maliki dan salah satu Riwayat dari mahab Hambali tidak menerima kesaksian perempuan dalam pernikahan, talak, dan rujuk secara mutlak. Baik disertai laki-laki maupun tidak. Sikap berbeda ditunjukkan oleh mahab Zhahiri dan para intelektual muslim dan ulama kontemporer dalam hal persaksian ini. Mahan Zhahiri memahami ketentuan saksi 2:1 dalam QS. Al-Baqarah 282 tidak melihat keharusan adanya minimal satu orang laki-laki menyertai kesaksian perempuan. Mazhab ini hanya melihat adanya jumlah kelipatan dua.²⁵

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik adanya tiga kesimpulan sikap para ulama terhadap kesaksian perempuan, sebagaimana penulis sajikan dalam table di bawah ini.

Table 1 Pendapat Ulama Tentang Hukum Kesaksian Perempuan

No	Ulama	Pendapat
1	Syafi'i, Maliki, dan Sebagian mazhab Hanafi	Tidak membolehkan kesaksian perempuan dalam pernikahan walaupun disertai laki-laki sebab laki-laki merupakan syarat kesaksian dalam pernikahan.
2	Hanafi, Sebagian mazhab Hambali, dan Syiah aidiyah	Memperbolehkan kesaksian perempuan dalam pernikahan dengan syarat dua orang perempuan dan satu orang laki-laki
3	Mazhab Zhahiri,	Memperbolehkan kesaksian perempuan

²⁵ Abdul malik Syafi'i, *Dekontruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan dalam Perkawinan*, No 2, Vol 14, 2016.

	Muhammad Assad, Mahmud Syaltut, Asghar Ali Engineer, dan Muhammad Quthub	dalam pernikahan, adanya ketentuan 2:1 diserahkan kepada kondisi fakta sosial, jika perempuan memiliki tingkat kecerdasan dan profesionalisme seperti saat ini maka ada peluang perbandingan kesaksian 1:1.
--	--	---

B. Saksi Nikah Dalam Hukum Positif

1. Saksi Menurut Hukum Positif

Menurut Pasal 207 KUHPerdata perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Tujuan ideal perkawinan baik menurut hukum nasional (Undang-Undang No.1 Tahun 1974), hukum Islam dan hukum adat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi akan tetapi dalam realitanya sulit sekali untuk diwujudkan.²⁶

Pemahaman yang seperti itu tampaknya saat ini banyak menuai kritik, karena seolah-olah menempatkan posisi kaum perempuan lebih rendah dari pada kaum laki-laki. Akibatnya, banyak tuduhan terhadap Islam sebagai agama yang diskriminatif terhadap kaum perempuan.²⁷ Menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri²⁸. Pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyelidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

²⁶ Sartika Dewi. Determinan Yang Mempengaruhi Kasus Perceraian Pengadilan Agama Karawang Periode 2017-2018 di Hubungkan Dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. No 1, Vol 18, 2020.

²⁷ Nur Aisyah. *Kesaksian Perempuan*, Jurnal Al-Qadau, No 2, Vol 2, 2015.

²⁸ KUHP, Pasal 1, Ayat 26.

Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Menjadi saksi dalam persidangan merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Kesadaran orang menjadi saksi merupakan tanda bahwa orang tersebut telah taat dan sadar hukum. Sebaliknya, orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu, maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketentuan undang-undang Pasal 224 KUHP yang mengancam pidana terhadap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk datang sebagai saksi sedangkan ia telah dipanggil secara sah.

Pada hukum positif saksi terbagi menjadi tiga jenis saksi yang meringankan, saksi yang memberatkan, dan saksi mahkota :

a. Saksi yang meringankan

Saksi meringankan atau *a de charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditunjukkan pada dirinya. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010

b. Saksi yang memberatkan

Saksi yang memberatkan atau *a charge* adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi yang memberatkan. Dalam hal saksi yang memberatkan ini terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) KUHP.

c. Saksi mahkota

Saksi Mahkota, adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang Bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Saksi mahkota bukan lah istilah yang dikenal dalam KUHP. Namun istilah ini dapat ditemui dalam alasan yang tertuang dalam memori kasasi yang diajukan dalam kejaksaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011. Pengaturan keterangan saksi (mahkota) dalam Hukum Acara Pidana Indonesia tidak diatur dalam ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana. Kategori keterangan saksi (mahkota) dalam proses penegakkan hukum tindak pidana pencurian adalah saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), di mana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim, dan hal ini dimaksud untuk mempermudah pembuktian.²⁹

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sedangkan fungsi hukum dalam negara hukum adalah sebagai “*Social Control*” (Pengendalian tingkah laku masyarakat), yang maksudnya hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guna menciptakan suasana yang tertib, teratur dan tenteram. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan keterangan saksi (mahkota) dalam hukum acara pidana di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis kategori keterangan saksi (mahkota) dalam praktik penegakkan hukum tindak pidana pencurian.³⁰

Alat bukti saksi yang tegas-tegas disebutkan syarat-syaratnya limitatif dari variasi alat bukti saksi terdahulu, ternyata hanya lah untuk perkara pidana rajam atau dera akibat zina. Perkara-perkara pidana lainnya tidak disebutkan, sedang saksi untuk perkara-perkara perdata ternyata bervariasi.

Saksi merupakan pihak yang telah terlibat dalam perkara pidana. Ia menduduki peran dan fungsi yang penting dalam suatu pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenarannya. Maksud menanyai saksi adalah memberikan kesempatan untuk menyatakan bahwa tersangka tidak bersalah, ataupun jika bersalah mengakui kesalahannya. Mengingat peran dan fungsinya yang sangat penting maka Pemerintah menjamin hak dan kewajiban seorang saksi dan memberikan perlindungan khusus terhadap saksi tersebut yang diatur, dijamin dan dituangkan dalam Undang-Undang Republik

²⁹ I Made Sukadana, Amiruddin, Lalu Parman. *Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Pencurian*. ejournal.undip.ac.id No 1, Vol 14. 2018.

³⁰ I Made Sukadana, *Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Pencurian*. Journal Unram. No 1, Vol 1. 2021

Indonesia No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kedudukan saksi dalam perkara pidana merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk mengungkap dan membongkar kejahatan. Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, bahkan dalam praktek, kedudukan saksi sangatlah penting, sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan 'keterangan saksi' yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapatlah dipastikan suatu kasus akan menjadi peristiwa yang kabur, karena dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah pernyataan atau keterangan yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli.

Peranan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam proses perkara pidana akan dapat mengungkap tindak pidana yang terjadi. Sebab keterangan saksi dari sifatnya sebagai alat bukti yang utama maka keterangan saksi akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa disangkal oleh terdakwa³¹

Saksi memang alat bukti, tetapi saksi juga adalah manusia, tidak bisa disamakan dengan jenis alat bukti yang lain yang berupa barang dan sebagainya. Saksi sebagai subyek hukum tidak saja memiliki hak dan kewajiban tetapi juga pemangku kepentingan. Itulah sebabnya dalam banyak perkara pidana kesediaan untuk menjadi saksi dinilai orang mencari masalah. Karena saksi sering mendapat ancaman atau intimidasi baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya, apakah itu berupa ancaman fisik, psikis bahkan serangan balik secara hukum.

Dalam praktek peradilan pidana, pada kenyataannya saksi belum dapat secara penuh memberikan keterangannya guna mengungkap kebenaran materiil secara aman, tidak tertekan dan terlindungi dari serangan balik hukum. Lebih dari itu saksi juga tidak memiliki hak untuk menyampaikan keterangan dengan tidak berposisi, baik

³¹ Tiovary A. Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHP". No 4. (2016),

berposisi sebagai. Saksi hanya dimungkinkan menyampaikan keterangan dengan berposisi pada kedua kepentingan tersebut.

Agar di dalam persidangan bisa didapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin obyektif, dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa, KUHAP membagi dalam tiga kelompok pengecualian, yaitu:

1. Golongan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP), yaitu:
 - a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
 - b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
 - c. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Golongan saksi yang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan (Pasal 170 KUHAP), yaitu:
 - a. Mereka yang karena pekerjaannya atau harkat martabatnya atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya dan hal tersebut haruslah diatur oleh peraturan perundangundangan.
 - b. Jika tidak ada ketentuan yang mengatur jabatan atau pekerjaannya, maka hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Berkaitan dengan Pasal 170 ayat (1) KUHAP tentang mereka yang karena pekerjaan atau harkat martabatnya atau jabatannya, diwajibkan menyimpan rahasia, maka orang-orang tersebut adalah:

- 1). orang yang harus menyimpan rahasia jabatan, misalnya: dokter, apoteker dan notaris.
- 2). orang yang karena harkat dan martabatnya, misalnya: pastor. c. orang yang karena jabatannya, misalnya: bankir terhadap keuangan nasabahnya.

3). Golongan saksi yang boleh diperiksa tanpa sumpah (Pasal 171 KUHP), yaitu:

- a). Anak yang umurnya belum lima belas tahun atau belum pernah kawin.
- b). Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Dalam penjelasan pasal dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psikopat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai 'petunjuk' saja. Agar keterangan saksi mempunyai nilai kesaksian serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, pada prinsipnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1). Saksi harus hadir dalam persidangan;
 - 2). Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji;
 - 3). Saksi menerangkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan apa yang ia alami dengan menyebut dasar pengetahuannya;
 - 4). Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian.

Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, bahkan dalam praktek, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan 'keterangan saksi' yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Berikut ini contoh kasus bagaimana pentingnya kedudukan saksi dalam suatu perkara pidana, disebut sebagai saksi mahkota. Tokoh yang tergolong dalam saksi mahkota

(*whistleblower*) adalah Komisaris Jenderal (Komjen) Pol. Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI. Susno Duadji merupakan orang yang pertama kali membeberkan adanya praktik mafia hukum yang menyeret Gayus Tambunan dan kawan-kawan kepada publik. Gayus Tambunan adalah pegawai Direktorat Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat kasus pencucian uang dan korupsi puluhan miliaran rupiah. Tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapatlah dipastikan suatu kasus akan menjadi peristiwa yang kabur, karena dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah pernyataan atau keterangan yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli.³²

Secara sosiologis, pengertian saksi sering dipahami meliputi juga “ahli”, sehingga populer istilah “saksi ahli”.⁷ Namun secara yuridis, antara ‘saksi’ dan ‘saksi ahli’ adalah berbeda, itu sebabnya dalam Pasal 184 KUHAP dibedakan antara ‘keterangan saksi’ dan ‘keterangan ahli’ sebagai dua alat bukti yang berbeda.

Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.³³ Sedangkan dalam Pasal 1 butir 28 disebutkan bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.”³⁴

Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi tidak selamanya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, ada dua syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Syarat formil; Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan

³² Tiovany A. Kawengian, “Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP”. No 4. (2016)

³³ KUHAP, Pasal 1, Ayat 27.

³⁴ KUHAP, Pasal 1, Ayat 28.

saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakans ebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.

2. Syarat materiel; Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian karena tidak memenuhi syarat materiel, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.³⁵

a. Hak dan Kewajiban Saksi

Mengenai hak dan kewajiban seorang saksi, maka sudah jelas bahwa seseorang yang dipanggil sebagai saksi dalam suatu perkara pidana berkewajiban hadir. Selain itu saksi juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- 1) Sebelum memberi keerangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya.³⁶
- 2) Saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan keterangan.³⁷
- 3) Para saksi dilarang untuk bercakap-cakap.

Sedangkan hak dari saksi antara lain:

- 1) Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut.³⁸
- 2) Berhak untuk dilakukan pemeriksaan ditempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik.
- 3) Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalm bentuk apapun.³⁹
- 4) Saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangan dengan memberikan alasan yang kuat.⁴⁰
- 5) Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat saksi.⁴¹

³⁵ Tiovary A. Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHP". No 4. (2016)

³⁶ KUHP, Pasal 160, ayat 3.

³⁷ KUHP, Pasal 167

³⁸ KUHP, Pasal 112, ayat 1.

³⁹ KUHP, Pasal 117, ayat 1.

⁴⁰ KUHP, Pasal 118, ayat 2.

- 6) Berhak atas juru Bahasa jika saksi tidak paham Bahasa Indonesia.⁴²
- 7) Berhak atas seseorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan tuli serta tidak dapat menulis.⁴³

Dengan diucapkan sumpah atau janji ini maka diharapkan saksi tidak berani memberikan keterangan yang tidak benar, baik karena perasaan/keyakinan keagamaannya ataupun karena adanya ancaman pidana terhadap perbuatan memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Pasal 242 KUHPidana, mengenai tindak pidana sumpah palsu atau keterangan palsu, ditentukan antara lain bahwa :

- a). Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- b). Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 14 Adanya ancaman pidana terhadap perbuatan yang merupakan sumpah palsu dan keterangan palsu ini menjadi dasar yuridis bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar.⁴⁴

2. Saksi Dalam Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, atau putus hubungan antara suami dan istri. Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntunan salah satu pihak dalam perkawinan. Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan.

⁴¹ KUHP, Pasal 166.

⁴² KUHP, Pasal 177, ayat 1.

⁴³ KUHP, Pasal 178, ayat 1.

⁴⁴ KUHP, Pasal 242, Ayat 1-2.

Dalam hukum Islam perceraian dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan Khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. Namun apabila di Indonesia keluarga yang bercerai dengan menggunakan hukum Islam maka akan menyusahkan kedua belah pihak, karena hukum Islam sebuah perceraian hanya menggunakan lisan tidak ada surat yang menyatakan secara sah bercerai. Oleh karena itu di Indonesia telah membuat undang-undang tentang perceraian agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan karena perceraian tersebut atau tidak menyusahkan kedua belah pihak jika mereka ingin menikah kembali dan juga tidak menyusahkan anak untuk mendapat nafkah dari ayah kandungnya.⁴⁵ Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian telah diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.⁴⁶

Setiap manusia yang hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan pasti mendambakan agar keluarga yang dibinanya dapat berjalan secara harmonis dan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal senada sebagaimana ditegaskan, dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri. Apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

⁴⁵ Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, Umma Ainayah. Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19. (Mian Journal Of Islamic Law, No 2, Vol 4, 2020).

⁴⁶ Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, (Al-Hikmah dan DITBINBAPERA, Jakarta No. 52 Th. XII 2001)

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik itu kehendak Bersama atau pun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan Pemerintah. Namun demi menghindari tindak sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan. Adapun pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama islam di Pengadilan Agama sedangkan bagi yang beragama non muslim di Pengadilan Negeri.

Saksi dalam suatu perceraian adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang keadaan atau suatu peristiwa yang mereka lihat atau alami sendiri, sebagai bukti atas kejadian atau keadaan yang terjadi. Setiap perkara perceraian di pengadilan agama, hakim selalu mewajibkan para pihak untuk mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalilnya. Saksi-saksi yang diajukan tentu saksi-saksi yang sedikit banyak tahu keadaan rumah tangga para pihak yang mengajukan perceraian.

Pada umumnya hakim pengadilan agama akan menanyakan hubungan saksi dengan para pihak, apakah bersaudara, teman atau tentangga. Selebihnya hakim akan menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkara perceraian sejauh pengetahuan saksi.

Pemahaman bahwa hukum perceraian adalah bidang hukum keperdataan, selaras dengan pengertian hukum perkawinan yang dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori, yaitu: Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi atau peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.

C. Hukum Kesetaraan Dalam Islam

1. Kesetaraan Gender Menurut Al-Quran dan Hadis

Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip egalitarian yakni persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Hal ini diisyaratkan dalam QS. al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٣)

Artinya : Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Al-Hujurat : 13)

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. Persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt. Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian sekalipun secara teoritis al-qur'an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.

Disadari bahwa isu gender merupakan isu baru bagi masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai tafsiran dan respons yang tidak proposional tentang gender. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah bermacam-macamnya tafsiran tentang pengertian gender.

Kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin.⁴⁷ Dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan

⁴⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gramedia, cet. XII, 1983).

(*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁴⁸

Gander merupakan suatu konsep mengenai peran laki-laki dan perempuan di suatu masa dan kultur tertentu yang di kontruksi secara sosial masyarakat, sedangkan sex adalah perbedaan jenis kelamin secara biologis dan fisiologis antara laki-laki dan perempuan yang dilihat secara anatomis dan reproduksi. Tuhan menciptakan jenis kelamin (sex), sementara manusialah yang menciptakan perbedaan gander bagaimana menjadi perempuan dan laki-laki, lebih lanjut negara dan manusialah yang menciptakan diskriminasi.⁴⁹

Gender adalah semua atribut sosial mengenai laki-laki dan perempuan, misalnya laki-laki digambarkan mempunyai sifat maskulin seperti keras, kuat, rasional, gagah. Sementara perempuan digambarkan memiliki sifat feminin seperti halus, lemah, perasa, sopan, penakut. Perbedaan tersebut dipelajari dari keluarga, teman, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan dan kebudayaan, sekolah, tempat kerja, periklanan dan media.⁵⁰

Gender berbeda dengan seks. Seks adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan dilihat secara biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara sosial, masalah atau isu yang berkaitan dengan peran, perilaku, tugas, hak dan fungsi yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki. Biasanya isu gender muncul sebagai akibat suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan gender (Suharti, 1995)

Istilah “gender” diperkenalkan untuk mengacu kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki tanpa konotasi-konotasi yang sepenuhnya bersifat biologis. Jadi rumusan ‘gender’ dalam hal ini merujuk pada perbedaan-perbedaan antara perempuan dengan laki-laki yang merupakan bentukan sosial, perbedaan-perbedaan yang tetap muncul meskipun tidak. Gender di sebabkan oleh perbedaan-perbedaan biologis yang menyangkut jenis kelamin.⁵¹

2. Kesetaraan Gender Menurut Tokoh

⁴⁸ Helen Tierney (Ed.), *Women's Studies Encyclopedia* Vol. I (New York: Green Wood Press),

⁴⁹ Elfi Muawanah, “*Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*” (Yogyakarta, Teras. 2009).

⁵⁰ Tanti Hermawati, “*Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender*”, No 1, (2007).

⁵¹ Tanti Hermawati, “*Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender*”, No 1, (2007).

- a. Nasarudin Umar memaknai gender sebagai konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari aspek sosial dan budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.⁵² Sehingga permasalahan jenis kelamin tidak ada kaitannya dengan masalah gender, karena jenis kelamin bersifat alamiah. Berbeda dengan gender, yang dianggap oleh kaum feminis bersifat sosial dan budaya yang dibuat oleh manusia, bisa berubah dari waktu ke waktu, dari kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain.
- b. M. Quraish Shihab menjelaskan tentang konsep kesetaraan gender, bahwa pada dasarnya manusia adalah satu jiwa, yang membedakan hanyalah bentuk rupa, ukuran tinggi dan besar kecil badannya, warna kulit, bahasa dan sebagainya yang semua itu hanya sebagai tampilan luar saja. Sementara dalam jiwa kemanusiannya semua manusia sama, memiliki ciri-ciri yang sama, hidup bermasyarakat, sama-sama berfikir, sama-sama mendambakan kehidupan yang damai dan bahagia sampai seterusnya.⁵³
- c. Yusuf Al-Qardawi tujuan-tujuan Al-Qur'an adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hambanya. Al-Qur'an memuliakan semua manusia, laki-laki dan perempuan punya hak yang sama dalam segala aspek kehidupan; Pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Mereka juga diberikan hak yang sama rata untuk berpartisipasi untuk menjadi pemimpin publik. Selain itu, mereka memiliki hak yang sama dalam memeluk agama sesuai dengan kemantapan hati dan keyakinan masing-masing dan mereka punya hak untuk mendapatkan warisan serta memiliki hak kepemilikan terhadap barang-barang yang dimilikinya. Dengan demikian laki-laki dan perempuan pada hakikatnya memiliki hak-hak yang sama dalam islam.⁵⁴

Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang

⁵² Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif alQur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999).

⁵³ Siti Nur Aisyah Amalia, *Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Komparasi Pemikiran R.A Kartini dan M Qiraish Syihab)* (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel Surabaya).

⁵⁴ Ainol Yaqin, Analisis Eksploratif Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender Sebagai Bagian Maqasid Al-Quran, No 1, Vol 30, (2019).

tidak bisa di-ubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Hal ini terkadang menjadikan perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Bahkan budaya yang telah terbentuk lama, hampir sebagian besar peran yang ditempelkan pada perempuan adalah peran yang sifatnya lemah, kurang menantang dan bersifat kedalam atau ranah domestic.⁵⁵

Dari beberapa pengertian di atas peneliti menyimpulkan gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Antara gender dan sex sangat berbeda, secara umum dapat dikatakan bahwa gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dan lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya, maka sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Dalam hal ini, istilah sex lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya.

3. Kesetaraan Gender Dalam Teori Umum

.Teori tentang kesetaraan gender terbagi dalam beberapa kajian teori diantaranya adalah :

1) Teori Nurture

Menurut teori nurture, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orang-orang yang konsen memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki (kaum feminis) yang cenderung mengejar “kesamaan” yang kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas (*perfect equality*).

2). Teori Nature

⁵⁵ Tanti Hermawati, “Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender”, No 1, Vol 1(2007).

Menurut teori nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Manusia, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial, ada pembagian tugas (*division of labour*), begitu pula dalam kehidupan keluarga karena tidaklah mungkin sebuah kapal dikomandani oleh dua nakhoda. Keluarga adalah sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan isteri untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara perempuan dan laki-laki, dan hal ini dimulai sejak dini melalui pola pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga.

3) Teori Equilibrium

Disamping kedua aliran tersebut, terdapat paham kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi/keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (jumlah/quota) dan tidak bersifat universal. Kesetaraan gender dapat terjadi dengan memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasi atau keadaan. Dengan kata lain laki-laki dan perempuan harus bekerjasama karena dalam teori ini ditekankan keharmonisan dalam hubungan laki-laki dan perempuan.⁵⁶

⁵⁶ Rudi Aldianto, dkk. Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa. No 1, Vol 3, (2015), Jurnal Equilibrium pendidikan sosiologi.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Saksi Nikah Prespektif Husein Muhammad

1. Biografi Husein Muhammad

Husein Muhammad atau yang sering dikenal dengan buya Husein lahir pada tanggal 9 Mei 1953, di Cirebon, Jawa Barat. Buya Husein merupakan putra dari Asyrofuddin dan Zainab, ayah Husein Muhammad merupakan seorang pegawai di pemerintahan di daerahnya sedangkan ibunya megajar di pondok pesantren yang didirikan oleh kakeknya. Husein Muhammad lahir di lingkungan yang kental dengan nilai ke Islaman, buya Husein lahir di lingkungan pondok pesantren yang didirikan oleh kakeknya sendiri. Husein Muhammad memiliki 8 saudara yang semuanya adalah kyai di daerahnya masing-masing.

Husein Muhammad melepas masa lajangnya dengan menikahi Nyai. Hj. Lilik Nihayah Fuadi. Dari pernikahan itu mereka dikarunia 5 orang anak putra dan putri diantaranya Hilya Aulia lahir pada tahun 1991, Layali Hilwa lahir pada tahun 1992, Muhammad Fayyaz Mumtaz lahir pada tahun 1994, Najla Hammaddah lahir pada tahun 2002, dan Falza Muhammad yang lahir pada tahun 2003.

Husein Muhammad adalah salah satu dari sedikit Ulama laki-laki yang banyak mencetuskan pemikiran-pemikiran kritis berbasis teks agama dan kiab-kiab kuning. Husein Muhammad merupakan salah satu tokoh gander yang menyuarakan kesetaraan, dalam upayanya untuk membela hak-hak perempuan dan membedah pemapanan relasi timpang. Husein Muhammad adalah pengusung yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasar islam, yaitu keadilan (*'adalah*), musyawarah (*syura'*), persamaan (*mu'sawah*), menghargai kemajemukam (*ta'addubiyah*), toleransi terhadap perbedaan (*tasamuh*), dan perdamaian (*ishlah*).

2. Riwayat Pendidikan

Husein Muhammad mengenam Pendidikan agama sejak kecil, selain pendidikan formal Husein Muhammad juga belajar di madrasah diniyah. Husein Muhammad menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 1996 yang kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Arjawinangun, setelah menyelesaikan pendidikan SMP Husein Muhammad melanjutkan studinya ke pondok pesantren Lirboyo di daerah kediri Jawa Timur selama 3 tahun. Setelah dari pondok pesantren Lirboyo Husein Muhammad melanjutkan studi nya ke Perguruan Tinggi Negeri Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) selama 5 tahun.¹ Selama kuliah Husein Muhammad aktif di organisasi kemahasiswaan dan sempat menjabat Dewan Mahasiswa pada tahun 1979.

¹ Husein Muhammad. *Menuju Fiqh Baru*. (Yogyakarta. IRCiSoD.2020).

Husein Muhammad setelah menyelesaikan S1 nya , kemudian melanjutkan Pendidikannya ke Universitas al-Azar, Kairo, Mesir. Di tempat ini, ia mengaji secara individual pada sejumlah ulama. Husein Muhammad juga belajar di *Dhirasat Khashah (Arabic Special Studies)*, lewat institusi ini buya Husein mengenal Muhamad Abduh, Ali Abdur Raziq, Muhammda Iqbal dan lainnya , mereka mempunyai pemikiran-pemikiran islam modern yang berhasil mereka kembangkan.

3. Karya Husein Muhammad

Husein Muhammad juga aktif menulis di sejumlah media masa, menulis buku, dan menerjemahkan. Ada sekitar 20 buku yang telah dihasilkan oleh Husein Muhammad, dan ada beberapa buku yang digunkan sebagi refrensi dalam penulisan skripsi ini yaitu salah satunya adalah *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan*.

Karya buku-buku dari Husein Muhamad ialah :

- a. Islam Agama Ramah Perempuan, (2020)
- b. Ijtihad Kiyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender, (2011)
- c. Spiritualitas Kemanusiaan, (2006)
- d. Mengaji Pluralisme Kepada Maha Guru Pencerahan, Sang Zahid : Mengarungi Sufisme Gus Dur, (2011)
- e. Menyusuri Jalan Cahaya, Fiqh Seksualitas, Fiqh HIV/AIDS, (2013)
- f. Gus Dur dalam obrolan Gus Mus, (2015)
- g. Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai (2020)
- h. Memilih Jomblo : Kisah Para Intelektual Muslim yang Berkarya Sampai Akhir Hayat, (2015)
- i. Tradisional yang Terus Bergerak, (2019)
- j. Kaidah Cinta dan Kearifan, (2019)
- k. Menuju Fiqih Baru (2020)
- l. Perempuan Ulama di atas panggung sejarah (2020)
- m. Fiqh perempuan (2020)

Husein Muhammad dikenal sebagai Kiai Feminis, yakni ulama yang mengkaji tentang perempuan dengan berperspektif keadilan bagi umat manusia khususnya perempuan yang sering mengalami ketidakadilan. Husein Muhammad juga aktif di LSM perempuan, dengan komitmennya dalam membela kaum perempuan mengantarkan Husein Muhammad menjadi komisioner di Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) selama dua periode 2007-2009 dan 2009-2012.

4. Penghargaan Yang Diterima

Husein Muhammad juga menerima award (penghargaan) dari berbagai instansi yaitu :

- a. Menerima award Pemerinah AS untuk “Heroes To End Modern-Day Slavery” pada tahun 2006.
- b. Namanya juga tercatat dalam The Most Influential Muslims” yang diterbitkan oleh The Royal Islamic Strategic Studies Centre, Amman, Yordania, berturut-turut dari tahun 2010-2016.
- c. Tahun 2019, Husein Muhammad memperoleh penghargaan Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.²
- d. Lembaga yang didirikannya Fahmina Institute menerima penghargaan Opus Prie dari Amerika Serikat tahun (2013)

5. Pemikiran Husein Muhammad Tentang Kesaksian Dalam Pernikahan

Dasar dari pemikiran Husein Muhammad yakni tentang keterbukaan untuk menerima segala pendapat dari manusia. Menurut Husein Muhammad segala ilmu yang baik itu semua berasal dari Allah Swt, segala kebijakan dari siapapun itu sebenarnya hikmah dari Allah tanpa memandang dari siapapun meskipun berbeda ras, suku bahkan berbeda agama, jika sesuatu itu baik alangkah baiknya untuk diapresiasi. Banyaknya perbedaan pendapat tentang gender disinyalir karena melihat dari mana gender itu berasal dan siapa yang mencetuskan gender itu pertama kali. Husein Muhammad tidak pernah mempermasalahkan hal ini , selama baik dan dapat membawa kemaslahatan untuk semua ummat itu semua akan menjadi hikmah dari Allah Swt.

Husein Muhammad juga memahami tauhid sebagai perwujudan terhadap hak-hak setiap manusia, pada dasarnya apapun latar belakang manusia, dari manapun ia berasal, dan pada akhirnya berasal dari satu sumber yakni ciptaan Allah Swt. Tidak ada perbedaan kedudukan diantara manusia, maupun itu laki-laki atau pun perempuan karena kedudukan yang tertinggi hanyalah milik Allah Swt.

Husein Muhammad juga menjunjung tinggi

Husein Muhammad menyatakan bahwa “sebagai manusia, perempuan memiliki seluruh potensi kemanusiaan sebagaimana dimiliki laki-laki. Dengan kata lain, sebagaimana halnya laki-laki, perempuan memiliki kekuatan fisik, akal pikiran, kecerdasan intelektual, kepekaan spiritual, hasrat seksual, dan sebagainya, potensi-potensi (*al-Quwa*) kemanusiaan tersebut diberikan Tuhan kepada semua

² Husein Muhammad. *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. (Yogyakarta. IRCiSoD.2020).h 126

manusia yang hidup dimanapun dan kapan pun sebagai prasyarat menjalankan amanah Tuhan, yaitu mengelola dan memakmurkan bumi dan alam”

Pemikiran Husein Muhammad diatas pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segala potensi kemanusiaan, begitu juga pada kesaksian laki-laki dan perempuan pada saat menyaksikan ijab qobul atau saat pernikahan dan perempuan berhak untuk menjadi seorang saksi di dalam pernikahan. Potensi kemanusiaan tersebut diberikan kepada semua manusia baik itu laki-laki atau pun perempuan, untuk menjalankan amanah dari Tuhan untuk memakmurkan dan mengelola bumi beserta isinya, tanpa membedakan kedudukan manusia di bumi ini.

Maka dari penjelasan di atas wajar apabila Husein Muhammad berpendapat manusia di muka bumi itu sama, karena memiliki potensi yang sama untuk dikembangkan dan diasah agar dapat membantu mengembangkan suatu negara. Kesamaan atau kesetaraan itu ada di segala aspek yang ada di dunia, begitupun dalam aspek kesaksian untuk membuktikan suatu kebenaran, perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk bersaksi di dalam persidangan maupun saksi dalam pernikahan.

B. Saksi Nikah Prespektif Musdah Mulia

1. Biografi Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia lahir pada tanggal 3 Maret 1958, di Bone, Sulawesi Selatan. Musdah Mulia merupakan putri dari pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Ahmad. Ibu dari Musdah Mulia adalah satu-satunya wanita pertama di Desanya yang bisa menyelesaikan Pendidikan di Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad (DDI), Pare-pare. Sedangkan ayahnya pernah menjabat komandan batalyon dalam Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang banyak dikenal dengan gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan.

Bone hanyalah tempat lahir Musdah Mulia, karna pada usia 2 tahun ia dibawa orang tuanya pindah ke Pulau Jawa tepatnya di Surabaya. Surabaya merupakan tempat Musdah Mulia menghabiskan waktu masa kecilnya, setelah menginjak usia 7 tahun Musdah Mulia dan kedua orang tuanya memutuskan pindah ke Ibu kota Jakarta tepatnya di Daerah Tanjung Priuk.

Selang beberapa lama, Musdah Mulia kemudian pindah ke Kota kelahirannya Teluk Bone, mereka pindah atas saran dari kakeknya yang tidak ingin terpengaruh oleh lingkungan yang negatif di kesehariannya. Pada tahun 1984, Musdah Mulia menikah dengan Ahmad Thabib Raya. Kini suami dari Musdah Mulia adalah seorang guru besar IAIN Syarif Hidayatullah jakara (sekarang sudah menjadi UIN).

Musdah Mulia adalah perempuan Ulama, intelektual, dan sekaligus aktivis yang bersikap sangat kritis terhadap berbagai pandangan mayoritas yang tidak

rasional dan tidak humanis, khususnya dalam isu keislaman dan hak-hak perempuan. Semua ini dilakukan demi mewujudkan islam yang *rahmanatan lil alamin*, sekaligus membangun masyarakat sipil yang beradab.³

2. Riwayat Pendidikan Musdah Mulia

Musdah Mulia menyelesaikan Pendidikan dasar pada sebuah Pesantren tradisional, di Pesantren As'adiyah, Sengkang, Sulawesi Selatan. Setelah tamat Sekolah Dasar, Musdah Mulia melanjutkan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah nya di Pondok Pesantren yang sama, selanjutnya setelah menyelesaikan Pendidikan Tsanawiyahnya, ia di bawa oleh kakek neneknya ke Makasar dan melanjutkan Pendidikan SMA Perguruan Islam Datumuseng, Makasar.

Pada akhir tahun kelulusan, Musdah Mulia berhasil lulus dengan nilai terbaik (1974) Musdah sangat mengidamkan pendidikannya berlanjut ke IAIN Makassar. Namun, keinginannya terhambat sebab harus pindah kembali ke Sengkang. Di Sengkang, ia melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Syari'ah Perguruan Tinggi Islam As'adiyah (1977). Pada tahun ketiga dari pendidikannya ini, ia melanjutkan ke IAIN Makassar sebagaimana yang ia dambakan sejak awal.

Di IAIN Alaudin Makasar, ia memilih Program S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab yang jarang diminati. Selain di Adab, ia juga mengenyam pendidikan di Fakultas Ushuludin jurusan dakwah, Universitas Muslim Indonesia. Pada tahun 1980 ia meraih gelar sarjana Muda dengan risalah berjudul —Peran Puasa dalam Pembentukan Pribadi Muslim. Pada tahun 1982, ia menyelesaikan gelar sarjana muda di Fakultas Adab dengan judul risalah, *al-Qiyam al-Islamiah fi qisas*. Program Strata-2 (S-2) Bidang Sejarah Pemikiran Islam ia tempuh dalam waktu 2 Tahun di Institut Agama Islam Negeri Syahid, di Jakarta (1992).

Musdah Mulia melanjutkan pendidikan S3 di Bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN Syarif, di Jakarta pada (1997) dengan disertasinya berjudul Negara Islam dalam Pemikiran Husein Haikal. Mengingat tokoh Husein Haikal berasal dari Mesir, data-data yang lengkap mengenai dirinya harus ditelusuri di Mesir. Maka pada tahun 1994 ia bersama suaminya, Ahmad Thib Raya, mendapat kesempatan untuk melakukan penelitian disertasi di Kairo. Di sana ia meneliti berbagai sumber keilmuan yang berkaitan dengan wacana Pemikiran Husein Haikal, Husein Haikal adalah seorang politikus yang berpendidikan Barat, Haikal adalah pembela mati-matian faham Syeikh Ali Abdur Roziq yang sangat menghebohkan itu. Namun beberapa tahun kemudian Haikal menyesali perbuatannya dan berbalik menyerang pemikiran Syeikh Ali Abdur Roziq, negarawan Mesir yang amat terkemuka.

³ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, (Tangerang Selatan, PT Bentara Aksara Cahaya, 2020)

Dia juga pernah menempuh pendidikan non-formal di antaranya: Kursus Singkat mengenai Islam dan *Civil Society* di Universitas Melbourne, Australia. (1998); Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000); Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (International Visitor Program) di Amerika Serikat (2000); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001); Kursus Singkat Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002).⁴

3. Karya Musdah Mulia

Karya-karya Musdah Mulia dikenal sangat vocal menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan berupa keadilan, demokrasi, pluralisme, dan kesetaraan gender. Diantaranya

- a. Muslimah Reformis; perempuan pembaru keagamaan, (2020)
- b. Perempuan dan Politik, (2005)
- c. Islam dan *Violence Againsts Women*, (2006)
- d. Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, (2007)
- e. Islam dan Hak Asasi Manusia, (2010)
- f. Muslimah Sejati, (2011)
- g. Membangun Surga di Bumi : Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam, (2011)
- h. Mengupas Seksualitas, (2015)
- i. Ensiklopedia Muslimah Reformis. (2019)

4. Penghargaan Yang Diterima

- Sejumlah penghargaan nasional dan internasional diraihnya, antara lain
- a. *Internasional Women of Courage Award* (2007) dari Pemerintah AS atas kegigihan memperjuangkan demokrasi,
 - b. *Yap Thiam Hien Human Right Award* (2008) karena aktif membela kelompok rentan dan minoritas di Indonesia,
 - c. *Plangi Tribute to Women* dari kantor berita Antara (2009) karena aktivitasnya dalam penguatan literasi masyarakat,
 - d. *Internasional Woman Of The Year* (2009) dari pemerintah Italy atas kiprahnya memperjuangkan hak-hak perempuan,
 - e. NABIL Award (2012) karena vokal menyuarakan prinsip kebangsaan dan hak kebebasan beragama.⁵

⁴ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, (Tangerang Selatan, PT Bentara Aksara Cahaya, 2020)

⁵ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, (Tangerang Selatan, PT Bentara Aksara Cahaya, 2020)

- f. Tahun 2013 menerima penghargaan dari Himpunan Indonesia untuk Ilmu-ilmu Sosial sebagai ilmuwan yang melahirkan karya-karya yang berpengaruh dalam bidang ilmu sosial di Indonesia.
 - g. Penghargaan *The Ambassador of Global Harmony* (2014) dari Anad Ashram Foundation karena tekun memperjuangkan kebhinekaan dan pluralism.
 - h. *Humanity Award* (2019) dari International Forum for Peace and Human Rights atas kiprahnya merajut perdamaian melalui penegakan HAM di Indonesia.
5. Pemikira Musdah Mulia Tentang Kesaksian dalam Pernikahan

Musdah Mulia sebagai perempuan muslim yang sangat meyakini bahwa Islam adalah agama yang sangat sempurna. Ajaran yang memberikan semua tuntunan luhur bagi kehidupan manusia yang ada dimuka bumi ini, agar manusia dimuka bumi ini bisa selamat dan bahagia menuju kehidupan akhiratnya yang kekal dan juga abadi. Dengan itu Musdah Mulia begitu meyakini dan percaya bahwa Islam menjanjikan harapan hidup yang lebih baik kepada manusia, laki-laki dan perempuan. Sebab itu, bagi Musdah Mulia Islam paling vokal bicara soal keadilan dan persamaan antar manusia, termasuk didalamnya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

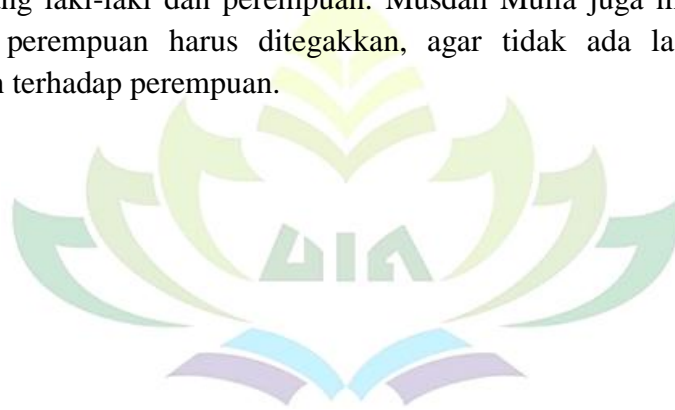
Jika membahas tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan tentunya mengecoh kepada ketidakadilan, ketidakadilan seperti melekat sekali pada diri seorang perempuan, yang pastinya perempuan Muslim pun mengalaminya. Saat membicarakan tentang perempuan Muslim dan terkenal mampu memainkan peran politik dengan baik, ada satu nama yang mungkin tidak asing bagi kita, dia adalah Fatimah binti Muhammad seorang anak yang sangat berbakti pada orang tuanya. Namun berani menentang perlakuan tidak adil pemerintah terhadap diri dan keluarganya sepeninggal Rasul. Secara politik dia memperjuangkan hak-haknya yang dirampas orang lain. Ia memainkan peran politik yang signifikan hingga kematiannya.

Musdah Mulia menyatakan bahwa “Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan laki-laki dan perempuan. Karena itu, islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan terutama terkait relasi gender.

Islam secara tegas mengajarkan hubungan antara gender perempuan dan gender laki-laki harus dibangun di atas prinsip keadilan dan kesetaraan. Maknanya, dalam relasi kedua gender tersebut tidak boleh ada ucapan, sikap dan perilaku yang mengandung unsur penghinaan, diskriminatif, eksploitatif dan kekerasan. Sebagai manusia yang mengemban tugas kekhalifahan yang sama, laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk saling mencintai dan mengasihi

secara tulus serta bekerja sama, saling bahu-membahu dan saling mendukung dalam melaksanakan *missi amar ma'ruf nahi munkar*. Seperti halnya kesaksian seorang laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, perempuan berhak untuk menjadi saksi karna sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang saksi di dalam pernikahan yang syaratnya ialah berumur 21 tahun, berakal sehat, cakap atau matang (*rasyid* atau *rasyidah*) ditunjuk berdasarkan kesepakatan calon suami dan pihak calon istri.

Maka dapat ditarik kesimpulan dari pendapat Musdah Mulia di atas bahwasannya Islam mengajarkan manusia untuk selalu adil dalam segala hal dan segala aspek. Islam juga merupakan agama yang *rahmatan lil alamin* , agama yang memberikan rahmat bagi seluruh manusia yang ada dimuka bumi ini tanpa memandang laki-laki dan perempuan. Musdah Mulia juga mengatakan keadilan terhadap perempuan harus ditegakkan, agar tidak ada lagi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia Tentang Kesaksian Laki-laki dan Perempuan dalam Pernikahan

Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* (agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta). Salah satu dari bentuk rahmat itu ialah pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan. Menurut Al-Qur'an, manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Manusia juga diciptakan sebagai khalifah untuk mengabdikan kepada Allah. Dalam Al Qur'an ada tiga hakekat manusia *Basyar*, bahwa manusia adalah makhluk biologis, *Al-Insan*, bahwa manusia adalah khalifah atau pemikul amanah, *Al-Nas*, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ukuran kemuliaan seorang manusia di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas takwanya seorang manusia, tanpa membedakan etnik dan jenis kelaminnya.

Allah Swt telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, seperti yang sudah dijelaskan dalam Q.S Al-Rum (30):21. Agar antara laki-laki dan perempuan memiliki rasa saling mencintai dan merasa tentram saat bersama setelah menikah. Agama islam memandang pernikahan adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji untuk menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak merusak dirinya sendiri. Nikah merupakan salah satu syariat islam yang dianjurkan oleh Rasulullah saw, pernikahan juga untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan kekeluargaan yang penuh kasih sayang dan penuh keberkahan.

Pernikahan merupakan perbuatan yang terpuji dalam Islam, tentunya ada rukun didalam pernikahan yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun nikah yang sudah diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Adapun rukun nikahnya ialah :

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi laki-laki
5. Ijab dan qabul

Apabila rukun nikah sudah terpenuhi sudah terpenuhi maka boleh dilangsungkan ijab dan qabul. Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya, apabila telah melakukan ijab dan qabul maka secara sah menurut agama mempelai laki-laki dan mempelai perempuan menjadi suatu keluarga. Peranan saksi sangat dibutuhkan untuk membuktikan suatu peristiwa atau kejadian yang sifatnya nyata.

Seseorang yang ditunjuk untuk menjadi saksi harus memenuhi beberapa syarat yaitu : laki-laki, baligh, sehat akal, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ibadah ihram.

Syarat untuk menjadi saksi dalam suatu pernikahan tidak disebut bahwa seorang perempuan bisa menjadi saksi, yang artinya secara tidak langsung perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. padahal peran seorang perempuan dalam suatu pernikahan itu sangatlah banyak, mulai dari mempersiapkan kebutuhan pernikahan, masak-masak dan sebagainya, bahkan perempuan banyak ikut andil dalam suatu pernikahan tersebut.

Husein Muhammad dan Musdah Mulia merupakan tokoh gander yang memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu untuk menganalisis pendapat Husein Muhammad dan Musdah Mulia peneliti terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan pendapat kedua tokoh tersebut tentang kesaksian laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan

Dasar dari pemikiran Husein Muhammad yakni tentang keterbukaan untuk menerima segala pendapat dari manusia. Menurut Husein Muhammad segala ilmu yang baik itu semua berasal dari Allah Swt, segala kebijakan dari siapapun itu sebenarnya hikmah dari Allah tanpa memandang dari siapapun meskipun berbeda ras, suku bahkan berbeda agama, jika sesuatu itu baik alangkah baiknya untuk diapresiasi. Banyaknya perbedaan pendapat tentang gander disinyalir karena melihat dari mana gander itu berasal dan siapa yang mencetuskan gander itu pertama kali. Husein Muhammad tidak pernah mempermasalahkan hal ini, selama baik dan dapat membawa kemaslahatan untuk semua ummat itu semua akan menjadi hikmah dari Allah Swt.

Husein Muhammad juga memahami tauhid sebagai perwujudan terhadap hak-hak setiap manusia, pada dasarnya apapun latar belakang manusia, dari manapun ia berasal, dan pada akhirnya berasal dari satu sumber yakni ciptaan Allah Swt. Tidak ada perbedaan kedudukan diantara manusia, maupun itu laki-laki atau pun perempuan karena kedudukan yang tertinggi hanyalah milik Allah Swt.

Kesaksian laki-laki dan perempuan berdasarkan pemikiran Husein Muhammad menyatakan bahwa sebagai manusia, perempuan memiliki seluruh potensi kemanusiaan sebagaimana dimiliki laki-laki. Dengan kata lain, sebagaimana halnya laki-laki perempuan memiliki kekuatan fisik, akal pikiran, kecerdasan intelektual, kepekaan spiritual, hasrat seksual dan sebagainya. Potensi-potensi (*Quwa*) Kemanusiaan tersebut diberikan Tuhan kepada manusia yang hidup dimana pun dan kapan pun sebagai prasyarat menjalankan amanah tuhan yaitu mengelola dan memakmurkan bumi dan alam.

Pemikiran Husein Muhammad diatas pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segala potensi kemanusiaan, begitu

juga pada kesaksian laki-laki dan perempuan pada saat menyaksikan ijab qobul atau saat pernikahan dan perempuan berhak untuk menjadi seorang saksi di dalam pernikahan.

Sama halnya dengan salah satu tokoh perempuan ulama, intelektual sekaligus aktivis yang bersikap sangat kritis terhadap berbagai pandangan mayoritas yang tidak rasional dan tidak harmonis khususnya dalam isu keislaman dan hak-hak perempuan yaitu Musdah Mulia, memiliki dasar pemikiran sebagai perempuan muslim yang sangat meyakini bahwa Islam adalah agama yang sangat sempurna. Ajaran yang memberikan semua tuntunan luhur bagi kehidupan manusia yang ada dimuka bumi ini, agar manusia dimuka bumi ini bisa selamat dan bahagia menuju kehidupan akhiratnya yang kekal dan juga abadi.

Dengan itu Musdah Mulia begitu meyakini dan percaya bahwa Islam menjanjikan harapan hidup yang lebih baik kepada manusia, laki-laki dan perempuan. Sebab itu, bagi Musdah Mulia, Islam paling vokal bicara soal keadilan dan persamaan antar manusia, termasuk didalamnya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Bahkan Musdah Mulia mengatakan seorang perempuan bisa menjadi kepala rumah tangga apabila suami tidak cakap untuk memimpin keluarganya sendiri. Pada zaman modern saat ini telah banyak perempuan yang merambah dunia politik bahkan banyak juga yang menjadi seorang Bupati, Walikota, dan sebagainya. Perempuan tidak lagi hanya mengurus kebutuhan rumah tangga saja pada zaman modern ini, karena dari hal pendidikan dan sosial laki-laki perempuan setara atau sederajat.

Jika membahas tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan tentunya mengecoh kepada ketidakadilan, sepertinya melekat sekali pada diri seorang perempuan, yang pastinya perempuan Muslim pun mengalaminya. Saat membicarakan tentang perempuan Muslim dan terkenal mampu memainkan peran politik dengan baik, ada satu nama yang mungkin tidak asing bagi kita, dia adalah Fatimah binti Muhammad seorang anak yang sangat berbakti pada orang tuanya. Namun berani menentang perlakuan tidak adil pemerintah terhadap diri dan keluarganya sepeninggal Rasul. Secara politik dia memperjuangkan hak-haknya yang dirampas orang lain. Ia memainkan peran politik yang signifikan hingga kematiannya.

Musdah Mulia menyatakan bahwa “Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan laki-laki dan perempuan. Karena itu, islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan terutama terkait relasi gender”. Pernyataan Musdah Mulia tersebut menitik beratkan kepada kesetaraan gender yang ia lihat masih banyak sekali diskriminasi eksploitasi, dan kekerasan yang terjadi pada perempuan.

Islam secara tegas mengajarkan hubungan antara gender perempuan dan gender laki-laki harus dibangun di atas prinsip keadilan dan kesetaraan.

Maknanya, dalam relasi kedua gender tersebut tidak boleh ada ucapan, sikap dan perilaku yang mengandung unsur penghinaan, diskriminatif, eksploitatif dan kekerasan. Sebagai manusia yang mengemban tugas kekhalifahan yang sama, laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk saling mencintai dan mengasihi secara tulus serta bekerja sama, saling bahu-membahu dan saling mendukung dalam melaksanakan misi *amar ma'ruf nahi munkar*. Seperti halnya kesaksian seorang laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, perempuan berhak untuk menjadi saksi karna sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang saksi di dalam pernikahan yang syaratnya ialah berumur 21 tahun, berakal sehat, cakap atau matang (*rasyid atau rasyidah*) ditunjuk berdasarkan kesepakatan calon suami dan pihak calon istri.

Berdasarkan pembahasan kedua tokoh sebelumnya, maka dapat dipahami antara Husein Muhammad dan Musdah Mulia terdapat persamaan yang mencolok dari segi pemikiran kedua tokoh. Pemikiran kedua tokoh adalah menyuarakan keadilan dalam kesetaraan gender. Manusia memiliki potensi dan hak yang sama baik itu laki-laki dan perempuan, Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan terutama terkait relasi gender. Allah Swt telah memberikan hikmah kepada manusia meskipun berbeda ras, suku, bahkan berbeda agama. Jika sesuatu itu baik, dan dapat diaplikasikan serta membawa kemaslahatan untuk semua umat manusia.

Maka dalam konteks pemikiran kesetaraan menurut Husein Muhammad dan Musdah Mulia perempuan diperbolehkan untuk menjadi saksi dalam pernikahan. Karna pada dasarnya perempuan juga mempunyai hak untuk mengembangkan potensinya tanpa dibeda-bedakan masalah gendernya. Bahkan Husein Muhammad beranggapan tidak memungkiri perempuan bisa lebih dominan dari hal sosial, ekonomi, dan politik.

Maka perlunya kerja sama antar laki-laki dan perempuan tanpa melihat gender dan lebih memperhatikan kesetaraan agar semua bisa membangun suatu bangsa yang kuat, tanpa adanya diskriminasi lagi terhadap perempuan. Karna prinsip utama agama itu sendiri adalah keadilan baik dari sistemnya, relasi gender, relasi sosial dan ekonominya.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Kesaksian Laki-laki dan Perempuan dalam Pernikahan Menurut Husein Muhammad dan Musdah Mulia

Hukum Islam atau syariat Islam adalah system kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukalaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Al-Quran merupakan pedoman bagi pemeluk agama Islam, yang mana didalam kandungannya menjelaskan tentang alam semesta yang meliputi segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi.

Pandangan hukum Islam yang membahas tentang saksi disebut dengan *syāhid* (saksi laki-laki) atau *syāhidah* (saksi wanita), yang terambil dari kata *musyāhadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dan saksinya adalah manusia hidup. Yang dimaksud dengan *syahādah* adalah keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. Oleh karena itu, dalam pengertian kesaksian dapat pula dimaksudkan kesaksian yang didasarkan atas hasil pendengaran, seperti kesaksian atas kematian, pernikahan, dan kasus pidana.

Qur'an surat Al Nisa ayat (135) Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: ١٣٥)

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa : 130)

Kesaksian dalam pernikahan merupakan salah satu rukun dari sah nya suatu pernikahan. Tidak akan sah suatu pernikahan apabila tidak dihadiri oleh saksi. Kesaksian dalam pernikahan pun memiliki syarat yang harus dipenuhi yaitu dua orang saksi laki-laki, seperti yang telah tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 25 “yang ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli”

Ketetapan kesaksian ini sangat bertolak belakang dengan pandangan menurut Husein Muhammad dan Musdah Mulia. Husein Muhammad adalah sosok yang sangat toleransi terhadap pendapat yang tidak merugikan orang lain, serta tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Husein Muhammad juga memahami tauhid sebagai perwujudan terhadap hak-hak setiap manusia, pada dasarnya apapun latar belakang manusia, dari manapun ia berasal, dan pada akhirnya berasal dari satu sumber yakni ciptaan Allah Swt. Tidak ada perbedaan kedudukan diantara manusia, maupun itu laki-laki atau pun perempuan karena kedudukan yang tertinggi hanyalah milik Allah Swt.

Pandangan yang sama menurut Musdah Mulia, yaitu mempertanyakan mengapa dalam KHI perempuan tidak boleh menjadi saksi perkawinan? padahal

mereka inilah yang paling banyak berperan mempersiapkan seluruh kelengkapan prosesi perkawinan. Mereka pun hadir ditengah-tengah perhelatan perkawinan bersama saudara mereka yang laki-laki. Ini jelas mengandung unsur diskriminasi bukan hanya dari prespektif keadilan gander, melainkan juga prespektif HAM secara umum. Selain perempuan, kelompok non muslim, orang buta, dan orang tuli juga tidak boleh bertindak sebagai saksi perkawinan. mengacu kepada al Quran yang mengecam perilaku diskriminatif ketentuan KHI sangat tidak relevan. Bahkan, dalam konteks persaksian ini, yang dituntut al-Quran justru bukanlah saksi ketika perkawinan, melainkan saksi pada perceraian (*thalaq*) sebagaimana dijelaskan dalam Quran *at-thalaq* [65] ayat 2. Selain itu islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan laki-laki dan perempuan. Karena itu Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, terutama terkait relasi gander.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia tentang kesaksian laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Husein Muhammad dan Musdah Mulia memiliki pemikiran tentang saksi dalam pernikahan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan Husein Muhammad berpendapat atau berkeyakinan manusia baik laki-laki perempuan memiliki potensi yang sama (*Quwa*) sedangkan Musdah Mulia mendorong isu kesetaraan gender, khususnya dalam hal saksi pernikahan.
2. Pandangan Hukum Islam tentang pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Hal kesetaraan menjadi wajar sebagai bentuk ijtihad kontemporer kedua tokoh tersebut, sebagai dinamika keilmuan terkait kesetaraan laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal kesaksian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindak lanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari penelitian ini :

1. Bagi pemerintah diharapkan untuk menindak lanjuti kembali pasal 25 KHI yang mengatur tentang kesaksian yang hanya seorang laki-laki. Persyaratan tersebut terlihat diskriminatif terhadap non-muslim, terhadap perempuan dan penyandang disabilitas rungu atau tuli. Islam telah mengajarkan hubungan antara gender laki-laki dan gender perempuan harus dibangun di atas prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga akan dapat membawa kemaslahatan bersama.
2. Bagi masyarakat diharapkan lebih kritis dalam melihat fenomena yang terjadi, agar tidak ada diskriminasi terhadap perempuan. Adanya kesetaraan gender diharapkan dapat memperjuangkan hak-hak perempuan supaya tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mengembangkan potensi-potensi kemanusiaan yang berlandaskan sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Ressindo, 2018.
- Abu Ahmad dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005).
- Al-Anshari, *Lisan Al- 'Arab*, (Kairo: Dar Al-Mishri, t.t), Juz VII.
- Alau ad-Din, Mu'in al Hukkam, *Mustafa Al-Baby Al-Halaby*, Mesir, 1973.
- Al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madhahib al-Arba'ah*, Vol. 4 (2004).
- Amin Sayyad Muhammad, "*Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution)*", No.1 (2018).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Dan Praktik* Jakarta: PT Rineka Cipta, (2006).
- Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, Umma Ainayah. Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19. (Mian Journal Of Islamic Law, No 2, Vol 4, 2020).
- Atus Ludin M dan muhamad Dani Somantri, "*kedudukan saksi non-muslim dalam perkawinan perspektif hukum islam*", No 2, Vol 4 (2019).
- Djalil Basiq, *Peradilan Islam* Jakarta: Amzah, (2012).
- Hermawati Tanti, "*Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender*", No 1, (2007).
- HIR, Pasal 145; RBg, Pasal 172; BW, Pasal 1910.
- HIR, Pasal 145; RBg, Pasal 172-173; BW, Pasal 1912
- HIR, Pasal 148; RBg, Pasal 174; BW, Pasal 1909
- Husein Muhammad dan Mamang Muhamad Haerudin, *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014).
- I Made Sukadana, Amiruddin, Lalu Parman. *Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Pencurian*. ejournal.undip.ac.id No 1, Vol 14. (2018).
- J Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, (1995).
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* Cet. I; Jakarta: Gramedia, cet. XII, (1983).
- Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2008).
- KUHAP, Pasal 167
- KUHAP, Pasal 1, Ayat 26.
- KUHAP, Pasal 1, Ayat 27.
- KUHAP, Pasal 1, Ayat 28.
- KUHAP, Pasal 112, ayat 1.
- KUHAP, Pasal 117, ayat 1.
- KUHAP, Pasal 118, ayat 2.

- KUHAP, Pasal 160, ayat 3.
- KUHAP, Pasal 166.
- KUHAP, Pasal 177, ayat 1.
- KUHAP, Pasal 178, ayat 1.
- KUHP, Pasal 242, Ayat 1-2.
- M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah dan Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, (1994).
- Mahmun Efendi Nur Mahmum, "Wali dan Saksi Dalam Pernikahan". ejurnal.unusurakarta. No. 34 (2014).
- Malik Syafe'I Abdul, "Dekonstruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan Dalam Perkawinan", No 2, Vol 11, (2016).
- Manan Abdul, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Jurnal Mimbar Hukum*, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA, Jakarta No. 52 Th. XII 2001.
- Muawanah Elfi, "Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia" Yogyakarta, Teras.(2009).
- Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan* Cet. Ke-1 Yogyakarta: Ircisod, (2019).
- Muhammad Husein. *Menuju Fiqh Baru*. Yogyakarta. IRCiSoD. (2020).
- Muhammad Husein. *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta. IRCiSoD. (2020).
- Mulia Musdah, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta, Pt Elex Media Komputindo Kompas- Gramedia (2014)
- Mulia Musdah, *Muslimah Reformis*, Tangerang Selatan, PT Bentara Aksara Cahaya, (2020)
- Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Permata Rosadakarya, (2010).
- Quthb Sayyid. *Fi Zhilalil-Qur'an*. Jakarta. GEMA INSANI. (2004).
- Shalahudin. *Konsep Kesetaraan Dalam Kesaksian Perempuan Antara Prespektif Wahyu dan Prespektif Gender*. Jurnal Tsaqafah. No 2. Vol 12. (2016)
- Siti Nur Aisyah Amalia, *Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Komparasi Pemikiran R.A Kartini dan M Qiraish Syihab)* (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- St Kuraedah, "Nikah Perspektif Al-Qur'an", No 1 Vol 19, (2013).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* Bandung, CV Alfabata, (2017).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Alfabete, (2012).
- Sukadana I Made, *Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Pencurian*. Journal Unram. No 1, Vol 1. (2021)
- Surin Bactiar. *Adz Dzikraa terjemah dan tafsir al-quran*. (Bandung. Penerbit Angkasa Bandung. 1991).
- Syakraeni, *Nikah Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Al-Hikmah, No 2, Vol 19, (2018)

- Tierney Helen (Ed.), *Women's Studies Encyclopedia* Vol. I New York: Green Wood Press.
- Tiovary A. Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP". No 4. (2016).
- Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Yaqin Ainol, Analisis Eksploratif Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender Sebagai Bagian Maqasid Al-Quran, No 1, Vol 30, (2019).
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, (2008).

